

Potret Ekonomi Indonesia Masa Pandemi COVID-19

“Catatan Kritis Temuan Empiris”

- Lucky Rachmawati • Hendry Cahyono • Jaka Nugraha
- Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah • Nurul Hanifa
- Editor: Dr. Tony Senoaji, S.E., M.E.

**Potret
Ekonomi
Indonesia
Masa
Pandemi
COVID-19**

“Catatan Kritis Temuan Empiris”



Buku yang luar biasa. Membaca judulnya sudah penasaran isinya. Di dalamnya kita menemukan bacaan yang mengalir, segar, nyaman, dan enak. Dengan mengeksplor data yang akurat dan analisis yang kuat, kita disuguhi potret ekonomi di masa pandemi. Di antara potret yang disuguhkan dalam buku ini adalah di satu sisi memang pandemi membuat kondisi perekonomian babak belur, tetapi di sisi lain kita diyakinkan oleh buku ini bahwa masih ada sektor-sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di masa pandemi.

Dr. H. Khoirul Anwar, M.E.I.

Sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam
Indonesia (IAEI) Provinsi Jawa Timur
2021-2025

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Alumni FEB Unesa



Buku yang padat data, informatif, dan kekinian khususnya mengupas tentang kondisi perekonomian di masa pandemi sehingga layak menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa ilmu ekonomi maupun khalayak umum. Lebih menarik lagi, buku ini didedikasikan kepada Prof. Ady Soejoto, Guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa, Founding Father Aspropendo (Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia) yang baru-baru ini menerima penghargaan *Lifetime Award*. Atas dedikasi buku ini, semoga menjadi jalan tenang beliau di sisi-Nya. Karena itu pula, metafora “kacang tidak lupa kulitnya” patut pula disematkan kepada para penulis sekaligus penjaga atmosfer akademik lewat karya-karya literatif.

Dr. Ulil Hartono, S.E., M.Si.
Ketua Dewan Pengurus Nasional APSMBI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Potret Ekonomi Indonesia Masa Pandemi COVID-19

“Catatan Kritis Temuan Empiris”

- Lucky Rachmawati • Hendry Cahyono • Jaka Nugraha
- Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah • Nurul Hanifa

- Editor: Dr. Tony Senoaji, S.E., M.E.

PENERBIT BUKU



Potret Ekonomi Indonesia Masa Pandemi COVID-19

“Catatan Kritis Temuan Empiris”

- Lucky Rachmawati • Hendry Cahyono • Jaka Nugraha
- Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah • Nurul Hanifa

Editor: Dr. Tony Senoaji, S.E., M.E.

Desain dan Tata letak: Studio MotoGeni

Gambar sampul: Diolah dari www.rawpixel.com

Cetakan Pertama **Februari 2022**

•

Pertama kali diterbitkan oleh:

Penerbit MejaTamu

Perum Sidokare Asri A5-17, Sidoarjo

Telp: 082121226464 - 082132198288

penerbit.mejatamu@gmail.com

www.mejatamu.net

xvi + 122 hlm; 14 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-5530-18-5

Bila Anda mendapati buku ini dalam keadaan rusak, jilid lepas, halaman terbalik, atau kosong. Silakan kirim kembali ke alamat penerbit untuk ganti cetakan baru.

Kata Pengantar

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat untuk dilalui baik oleh individu, dunia usaha, maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tidak ada satu negara pun yang memprediksi dan menyiapkan diri bahwa tahun 2020 akan menjadi awal masa pandemi yang begitu hebat akibat koronavirus (COVID-19). Ekonomi global mengalami guncangan, *outlook* ekonomi 2020 yang dibuat pada 2019 oleh lembaga ekonomi dunia seperti *World Bank* dan *International Monetary Funds* (IMF) meleset jauh. Sepertinya baru kali ini prediksi dari lembaga ekonomi internasional meleset jauh.

Kegagalan sebuah prediksi tentu akan memengaruhi pola kebijakan ekonomi dunia, termasuk kebijakan ekonomi Indonesia. Sejak penentuan awal masa pandemi pada 11 Maret 2020, tanda-tanda awan kelam bagi perekonomian global dan Indonesia sepertinya mulai terlihat. Respons dan kecemasan yang beragam dari masyarakat mencuat. Jumlah korban positif COVID-19 mulai bertambah sebagaimana yang bisa dibaca di bagian I buku ini. Pada bagian tersebut, Lucky Rahmawati menggambarkan kondisi ekonomi secara umum akibat munculnya pandemi terhadap kondisi ekonomi global. Dilanjutkan pada bagian II terkait bagaimana

analisis pergeseran 17 sektor ekonomi akibat pandemi. Bagian II ini tentu menarik bagi pembaca yang bergelut di bidang ekonomi regional karena pada bagian ini disajikan juga analisis pergeseran sektoral yang begitu lengkap.

Pada masa awal pandemi banyak ahli mencoba memprediksi dan mengkritisi pola kebijakan publik pemerintah baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. Pergulatan dan diskursus pemikiran sering sekali dijumpai baik di media massa, televisi, maupun media sosial. Pada bagian III buku ini, Nurul Hanifa menganalisis peran pemerintah dan kebijakan yang menitikberatkan pada porsi belanja pemerintah dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya fungsi penguatan pemerintah sebagai distributor pendapatan dikupas dalam bagian III, tetapi juga peran dan kontribusi masyarakat dalam menjaga APBN. Kita seperti diingatkan kembali pentingnya peran pemerintah yang kuat dan masyarakat yang harus sadar pajak.

Kondisi berat yang entah kapan berakhirnya tentu juga akan berdampak pada peran pemerintah daerah. Pada bagian IV buku ini dijelaskan oleh Ladi Wajuba dampak perubahan postur anggaran daerah akibat *refocusing* yang terjadi pada APBN. Respons kebijakan keuangan daerah harus dilakukan dengan cepat. Pada bagian IV kita diajak berpikir kembali bagaimana seharusnya sinergi pemerintah pusat dan daerah pada masa krisis pandemi. Harmonisasi pusat dan daerah dijadikan salah satu kunci penanganan wabah COVID-19.

Apabila melihat respons yang beragam dan kembali ada kecenderungan polarisasi masyarakat akibat pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, tentu ini akan menarik apabila dilihat dari kacamata ekonomi kelembagaan dengan menggunakan analisis ekonomi politik. Hasil analisis dari hal tersebut bisa dilihat pada bagian V buku ini. Bagaimana respons secara ideologi dan

prediksi pola kebijakan pascapandemi disajikan pada bagian V. Tidak hanya itu, pada bagian ini Hendry Cahyono juga mengajak pembaca mengingat kembali kejadian ekonomi dan politik dua tahun terakhir sebelum muncul pandemi. Kritisi (*early warning*) pola kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada tahun sebelum pandemi juga disajikan di bagian ini.

Pada bagian akhir buku ini (bagian VI) mengupas bagaimana peran dan strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi. Jaka Nugraha menyajikan hasil analisisnya terkait dinamika UMKM untuk bertahan pada pandemi. Selain itu, dikupas juga bagaimana strategi yang harus segera dilakukan UMKM sehingga bisa bertahan di saat pandemi dan berkembang di masa pascapandemi.

Dari hasil analisis yang disajikan dalam buku ini, tim penulis mengambil posisi untuk tidak ikut mengutuk kegelapan ekonomi dalam kondisi pandemi, akan tetapi tim penulis berusaha menyalakan pelita dalam lorong gelap kondisi ekonomi di masa pandemi. Kami sadar jika hanya mengkritisi kebijakan ekonomi tidak akan pernah ada halaman akhirnya. Setidaknya kami tetap memberikan energi optimis pada pembaca bahwa masa sulit bagi perekonomian ini bisa segera dilalui.

Last but not least, tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, yang telah mendukung dan memberikan kesempatan kepada kami untuk terus berkarya dengan keahlian analisis ekonomi kami yang beragam. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan normal baru mampu memberikan angin segar bagi perekonomian global dan Indonesia.

Tim Penulis



Penghormatan Kami Teruntuk:

Alm. Prof. Dr. H. Ady Soejoto, S.E., M.Si.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya

(Kawan, Orang Tua, sekaligus Guru Kami)

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ix
BAGIAN 1 GAMBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019	
Oleh Lucky Rachmawati	1
1.1 <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19)	2
1.2 Resesi Global	4
1.3 Manusia sebagai Input Utama Produksi	5
1.4 Dampak Wabah Penyakit terhadap Perekonomian	6
BAGIAN 2 PERGESERAN SEKTOR EKONOMI	
Oleh Lucky Rachmawati	9
2.1 Analisis Sektor Ekonomi	10
2.2 <i>Regional Growth Effect</i>	12
2.3 <i>Industry Mix Effect</i>	14
2.4 <i>Regional Share Effect</i>	16
2.5 <i>Total Effect</i>	21
2.6 Kesimpulan	24
BAGIAN 3 PERAN PEMERINTAH DAN KEBIJAKANNYA	
Oleh Nurul Hanifa	27
3.1 Analisis Ekonomi Publik	28
3.2 Peran Pemerintah dan Kebijakannya	28

BAGIAN 4 KEUANGAN DAERAH	
Oleh Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah	41
4.1 Analisis Keuangan Daerah	42
4.2 Keuangan Daerah Masa Pandemi COVID-19	42
4.3 Perubahan Postur APBN di Masa Pandemi	44
4.4 APBD di Masa Pandemi	47
4.5 Ketergantungan APBD terhadap APBN di Masa Pandemi	52
BAGIAN 5 DILEMA KEBIJAKAN, PILIHAN SULIT	
Oleh Hendry Cahyono	57
5.1 Analisis Ekonomi Kelembagaan	58
5.2 Kondisi Indonesia Pascapemilihan Umum 2019	52
5.3 Perekonomian Indonesia 2020 (Setahun Sebelum Pandemi)	65
5.4 Ekonomi Pariwisata, Sektor Rapuh yang Menjadi Idola Baru	71
5.5 Pilihan Sulit Ekonomi atau Kesehatan (Masa Pandemi)	76
BAGIAN 6 STRATEGI UMKM SAAT PANDEMI COVID-19	
Oleh Jaka Nugraha	93
6.1 Analisis Kewirausahaan	94
6.2 UMKM Masa Pandemi Koronavirus	95
6.3 Krisis Segera Berakhir	103
6.4 Pemanfaatan Teknologi untuk Mendukung Recovery dan Menghasilkan Perubahan	103
DAFTAR PUSTAKA	114
BIOGRAFI TIM PENULIS	119

Bagian 1

Gambaran Coronavirus Disease 2019

oleh Lucky Rachmawati

Berdasarkan laporan BNPB, angka jumlah orang yang positif terinfeksi coronavirus terus meningkat setiap harinya. Data jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia per 27 Mei 2020 dijelaskan pada Gambar 1. Secara keseluruhan wilayah di Indonesia masuk Zona Merah.

Tidak lama semenjak berita bahwa Indonesia juga terpapar coronavirus, beberapa kebijakan diterapkan pemerintah untuk penanganan dan pengendalian pandemi, di antaranya: 1) pemberlakuan protokol kesehatan WHO; 2) penyediaan fasilitas kesehatan untuk pasien terinfeksi coronavirus; dan 3) pembatasan sosial (*Social Distancing*) yang berkembang menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak semua wilayah di Indonesia menerapkan kebijakan PSBB. PSBB dilakukan karena jumlah orang terinfeksi coronavirus di wilayah



Sumber: BNPB, 2020c

Gambar 1.2 Sebaran Daerah PSBB di Indonesia per 14 Mei 2020

tersebut tidak dapat dikendalikan. PSBB dilakukan dengan tujuan menghambat penyebaran infeksi koronavirus sehingga kasus infeksi di wilayah tersebut dapat dikendalikan.

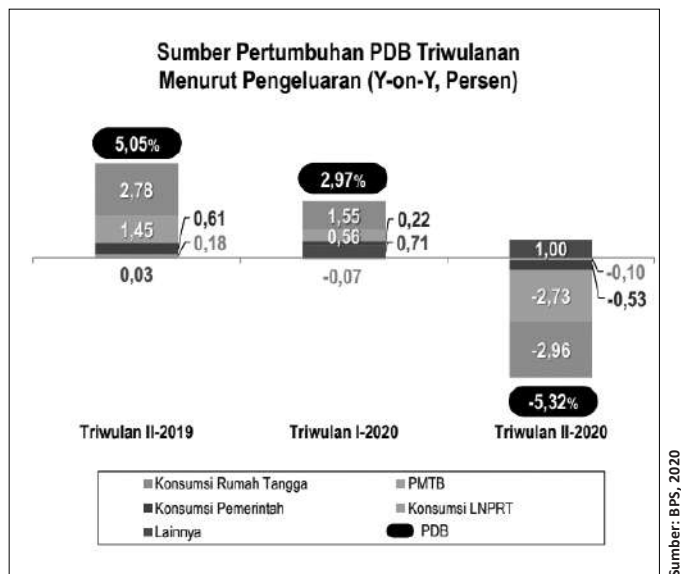
Pandemi koronavirus mengancam tatanan kehidupan masyarakat di segala bidang, termasuk di bidang ekonomi. Angka kematian penduduk akibat infeksi koronavirus sesuai Gambar 1 mencapai 1.473 orang. Kematian penduduk yang banyak tersebut tentu saja akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Simon Kuznets dalam Berg (2001) dan Julian Simon dalam Berg (2001) menjelaskan bagaimana kematian manusia akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain berkaitan dengan kematian, pandemi juga akan berdampak besar terhadap perekonomian suatu negara. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dampak dari wabah penyakit yang menjangkiti suatu wilayah, antara lain: United Nations Industrial Development Organization (2020), PwC Australia (2020); Bloom and Canning (2020), Qiu et.al (2017), Rassy and Smith (2012), dan Nicola et.al. (2020). Penelitian-penelitian tersebut membahas bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi.

1.2 Resesi Global

Pandemi COVID-19 menimbulkan guncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19, seperti penutupan sekolah dan beberapa kegiatan bisnis, pembatasan sosial berskala besar, bahkan *lockdown* mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Pertumbuhan PDB Triwulan II tahun 2020 sebesar -5,32%. Beberapa kondisi perekonomian terdampak COVID-19, sebagai berikut: a) industri pengolahan berkontraksi 6,19%;

b) pertanian tumbuh 2,19%; c) perdagangan berkontraksi 7,57%; d) konstruksi berkontraksi 5,39%; e) transportasi berkontraksi 30,84%; dan f) akomodasi dan makan minum berkontraksi 22,02 (BPS, 2020).



Gambar 1.3 Sumber Pertumbuhan PDB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Y-on-Y, Persen)

1.3 Manusia Sebagai Input Utama Produksi

Simon Kuznets dalam Berg (2001) menjelaskan, *“People are the critical input into the process through which technology progresses”*. Hal ini berarti bahwa manusia merupakan salah satu input penting dalam suatu proses produksi. Produksi tentu saja berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Kematian dalam jumlah besar berarti ekonomi kehilangan input penting dalam proses produksi. Produksi akan menurun dan akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Julian Simon dalam Berg (2001) menjelaskan, “*larger population also achieves economies of scale. A larger population implies a larger total demand for good; with larger demand and higher production come division of labor and specialization, larger plants, larger industries, more learning by doing, and other related economies of scale*”. Artinya bahwa populasi yang tinggi akan meningkatkan skala ekonomi dengan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Sekali lagi, banyaknya angka kematian akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Buku ini berusaha menampilkan potret perekonomian masa pandemi COVID-19 berdasarkan beberapa analisis, yakni analisis sektor ekonomi, analisis ekonomi publik, analisis keuangan daerah, analisis ekonomi kelembagaan, dan analisis kewirausahaan. Potret perekonomian masa pandemi COVID-19 perlu dilakukan sebagai bahan kajian merumuskan kebijakan ekonomi ke depan.

1.4 Dampak Wabah Penyakit terhadap Perekonomian

United Nations Industrial Development Organization (2020) menemukan beberapa dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi koronavirus, antara lain: 1) pembangunan manusia menurun; 2) mengurangi perdagangan global; 3) tingkat pengangguran meroket; 4) kemiskinan ekstrem; 5) mayoritas negara dilanda krisis; 6) negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah dan atas sangat terpengaruh; dan 7) banyak sektor menurun dibandingkan farmasi dan makanan.

PwC Australia (2020) mengasumsikan dampak selama 12 bulan ke depan yang harus ditangani, antara lain: 1) pengurangan input tenaga kerja secara umum; 2) ada pengurangan permanen dalam angkatan kerja akibat kematian yang dipicu koronavirus; 3) pengurangan produktivitas kapital dari ekonomi secara luas sebesar

-0,57% (sepertiga dari pengurangan tenaga kerja) mewakili kapasitas menganggur dalam perekonomian karena gangguan dalam rantai pasokan global; 4) ada peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan ketertiban umum 1% dari total pengeluaran pemerintah; 5) guncangan teknologi: ada peningkatan biaya perdagangan internasional. Industri yang terpengaruh secara khusus; 6) konsumsi pribadi berkurang sehingga meningkatkan penghematan 0,5%. Ini mencerminkan bahwa seiring waktu konsumen cenderung lebih berhati-hati untuk keluar dan menghabiskan uang.

Bloom and Canning (2020) menemukan dampak dari pandemi antara lain: 1) epidemi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kesehatan merupakan ukuran kesejahteraan yang utama; 2) perekonomian tidak berfungsi dengan baik; 3) menghalangi investasi dan pariwisata; dan 4) penambahan biaya langsung suatu epidemi dalam jangka pendek, sedangkan biaya jangka panjangnya tidak jelas.

Qiu et.al (2017) menemukan dampak pandemi antara lain: 1) jumlah kematian yang besar; 2) ketidakstabilan ekonomi. Dampaknya adalah melalui biaya langsung, beban jangka panjang, dan biaya tidak langsung; 3) dampak sosial pandemi sangat parah, termasuk perjalanan sangat terbatas, dan sekolah tutup, pasar dan olahraga ditutup. Semua ini adalah realitas yang kemungkinan akan memunculkan pandemi dengan potensi morbiditas dan mortalitas yang tinggi; dan 4) ancaman keamanan.

Rassy and Smith (2012) menemukan hasil dari studinya menunjukkan bahwa implikasi ekonomi yang lebih luas dari keadaan darurat terkait kesehatan dari dampak virus H1N1 di Mexico dapat menjadi signifikan dan perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kesiapsiagaan. Dampak dari pandemi H1N1 secara signifikan mengurangi jumlah wisatawan. Selain itu, berdampak juga terhadap

perusahaan babi, permintaan lokal dan persentase output yang diekspor ke negara-negara lain menurun. Pengawasan dan pengumpulan data yang lebih efektif akan memungkinkan kebijakan menargetkan dana darurat untuk sektor dan wilayah yang paling terpuak. Hasil ini juga menekankan pentingnya kedekatan dengan jaringan perdagangan sehingga dapat mengantisipasi respons internasional.

Nicola et.al. (2020) menemukan bahwa pembatasan sosial, isolasi diri, dan pembatasan perjalanan pada masa pandemi COVID-19 memaksa penurunan jumlah tenaga kerja di semua sektor ekonomi dan menyebabkan banyak pekerjaan hilang. Sekolah ditutup dan kebutuhan komoditas serta produk manufaktur menurun. Sebaliknya, kebutuhan akan pasokan medis telah meningkat secara signifikan. Sektor makanan juga telah melihat permintaan besar karena pembeli panik dan menimbun produk makanan.

Menanggapi wabah global ini, mereka merangkum efek sosio-ekonomi COVID-19 pada aspek individu dari ekonomi dunia. Kekhawatiran resesi baru dan keruntuhan keuangan membutuhkan kepemimpinan yang tangguh dan kuat dalam perawatan kesehatan, bisnis, pemerintah, dan masyarakat luas. Langkah-langkah bantuan segera perlu diimplementasikan dan disesuaikan untuk mereka yang mungkin jatuh. Perencanaan jangka menengah dan panjang diperlukan untuk bagaimana ekonomi diseimbangkan kembali dan diberi energi kembali setelah krisis ini. Rencana pengembangan sosial ekonomi yang luas, termasuk rencana sektor demi sektor dan ekosistem yang mendorong kewirausahaan sehingga mereka yang memiliki model bisnis yang kuat dan berkelanjutan dapat dibiarkan berkembang. Adalah bijaksana bahwa pemerintah dan lembaga keuangan terus-menerus menilai kembali dan mengevaluasi kembali keadaan dan memastikan bahwa janji “apa pun yang dibutuhkan” benar-benar tercapai. •

Bagian 2

Pergeseran Sektor Ekonomi

oleh Lucky Rachmawati

2.1 Analisis Sektor Ekonomi

Analisis sektor ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk menyusun strategi pengembangan potensi ekonomi suatu daerah. Suparmoko (2002) mengemukakan bahwa potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan rakyat setempat dan sumber daya perekonomian daerah. Beberapa strategi pengembangan potensi ekonomi, antara lain: 1) mengidentifikasi sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Selain itu, menentukan target pembangunan apakah pertanian atau industri; 2) mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah dan mencari faktor-faktor penyebabnya; 3) mengidentifikasi sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusianya; 4) melihat peranan pasar, apakah *inward looking* atau *outward looking*; 5) mengamati kemungkinan perkembangan suatu perekonomian dengan melihat titik pertumbuhan (*growing point*); 6) memperhatikan sektor-sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan kaitan ke depan (*forward linkage*); dan 7) melihat sektor pemimpin (*leading sector*).

Beberapa alat analisis ekonomi pembangunan wilayah dengan pendekatan matematis dapat digunakan. Nugroho dan Dahuri (2012) menjelaskan bagaimana perhitungan beberapa alat analisis ekonomi pembangunan wilayah, di antaranya: Koefisien Lokasi (*Location Quotient* atau LQ), Koefisien Spesialisasi (*Coefficient of Specialization* atau CS), Indeks Konsentrasi Industri (*Industrial Concentration Index* atau ICI), analisis *Shift Share*, dan analisis Input-output.

Analisis sektor ekonomi masa pandemi COVID-19 dilakukan untuk menganalisis sektor-sektor apa saja yang masih bisa dikembangkan sehingga perekonomian bisa meningkat kembali. Alat analisis yang digunakan, yakni dengan analisis *Shift Share*. Analisis

Shift Share digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi Indonesia. Analisis *Shift Share* bersifat dinamis dan dinilai dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Perubahan dan pergeseran sektor perekonomian dapat diketahui melalui analisis ini. Perubahan relatif pertumbuhan ekonomi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama satu periode tertentu dapat digambarkan dalam tiga efek. *Pertama*, adalah dampak yang disebabkan oleh perubahan pertumbuhan ekonomi nasional pada wilayah yang bersangkutan (*Regional Growth Effect*). *Kedua*, pengaruh dari berbagai sektor yang bersaing di dalam wilayah tersebut, ada sektor-sektor yang relatif tinggi dan ada yang relatif rendah dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan kondisi yang ada pada tingkat nasional (*Industry Mix*). *Ketiga*, suatu konsekuensi perubahan pertumbuhan ekonomi nasional dalam industri (sektor) yang sejenis (*Regional Share*), dalam arti persaingan di antara industri yang sama antar wilayah (Ghalib, 2005).

Hasil perhitungan analisis *Shift Share* akan memberikan gambaran tentang unsur-unsur yang memengaruhi pergeseran dan perubahan pada struktur ekonomi wilayah Indonesia.

Persamaan analisis *Shift Share*:

$$R_{ij} = G_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

- Keterangan:
- i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti
 - j = Variabel wilayah yang diteliti Indonesia
 - R_{ij} = Perubahan sektor i di daerah j (Indonesia)
 - G_{ij} = Pertumbuhan nasional sektor i di daerah j (Indonesia)
 - M_{ij} = Bauran industri (*industry mix*) sektor i di daerah j (Indonesia)
 - C_{ij} = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah j (Indonesia)

Analisis *Shift Share* dari kelima provinsi di Indonesia dibagi menjadi empat bahasan, yakni: *Regional Growth Effect*, *Industry Mix Effect*, *Regional Shares Effect*, dan *Total Effect*. Bahasan-bahasan tersebut terkait dengan pengaruh pertumbuhan nasional terhadap pertumbuhan sektoral pada provinsi, akselerasi pertumbuhan sektor pada provinsi dan keunggulan kompetitif sektoral pada provinsi.

2.2 Regional Growth Effect

Regional Growth Effect merupakan analisis mengenai pengaruh pertumbuhan nasional terhadap pertumbuhan sektoral pada provinsi.

Tabel 2.1 Regional Growth Effect (dalam miliar)

SEKTOR	PROVINSI				
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatera Utara
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(18,938)	(1,174)	(1,419)	(1,900)	(1,832)
Pertambangan dan Penggalian	(37,336)	(338)	(294)	(1,171)	(98)
Industri Pengolahan	(2,978,745)	(8,672)	(4,664)	(6,925)	(1,335)
Pengadaan Listrik, Gas	(87,658)	(77)	(16)	(64)	(10)
Pengadaan Air	(10,281)	(16)	(9)	(22)	(7)
Konstruksi	(3,150,273)	(1,865)	(1,456)	(2,234)	(974)

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(4,042,544)	(3,228)	(1,965)	(4,212)	(1,346)
Transportasi dan Pergudangan	(944,757)	(1,003)	(488)	(682)	(358)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(1,306,211)	(546)	(470)	(1,284)	(185)
Informasi dan Komunikasi	(2,902,991)	(831)	(710)	(1,349)	(217)
Jasa Keuangan	(2,737,415)	(523)	(375)	(570)	(210)
Real Estate	(1,610,308)	(276)	(258)	(397)	(314)
Jasa Perusahaan	(2,124,892)	(97)	(55)	(183)	(69)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(885,778)	(428)	(362)	(495)	(251)
Jasa Pendidikan	(1,222,882)	(585)	(555)	(639)	(151)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(435,043)	(165)	(123)	(157)	(72)
Jasa lainnya	(1,014,018)	(455)	(239)	(330)	(39)
TOTAL	(25,510,071)	(20,279)	(13,457)	(22,613)	(7,468)

Secara keseluruhan seluruh sektor di kelima provinsi nilai Gij < 0. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara negatif dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional di kelima provinsi.

2.3 Industry Mix Effect

Industry Mix Effect dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Industry Mix Effect (dalam miliar)

SEKTOR	PROVINSI				
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatera Utara
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	114,278	7,085	8,564	11,463	11,052
Pertambangan dan Penggalian	6,627	60	52	208	17
Industri Pengolahan	(1,195,027)	(3,479)	(1,871)	(2,778)	(535)
Pengadaan Listrik, Gas	(124,638)	(109)	(22)	(91)	(15)
Pengadaan Air	10,999	17	10	23	8
Konstruksi	(4,870,674)	(2,883)	(2,251)	(3,453)	(1,506)
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(1,931,925)	(1,542)	(939)	(2,013)	(643)
Transportasi dan Pergudangan	(4,944,808)	(5,251)	(2,552)	(3,569)	(1,872)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(4,744,563)	(1,983)	(1,707)	(4,665)	(673)
Informasi dan Komunikasi	6,396,642	1,831	1,564	2,973	478
Jasa Keuangan	(63,615)	(12)	(9)	(13)	(5)

Real Estate	1,678,148	288	269	413	328
Jasa Perusahaan	(4,185,101)	(191)	(108)	(359)	(136)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(909,264)	(439)	(372)	(508)	(258)
Jasa Pendidikan	(1,263,102)	(605)	(573)	(660)	(156)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	185,406	70	52	67	31
Jasa lainnya	(2,009,499)	(901)	(473)	(654)	(78)
TOTAL	(17,850,116)	(8,043)	(365)	(3,617)	6,037

Nilai Mij menggambarkan bauran industri di kelima provinsi Indonesia memiliki karakteristik sektoral yang sama. Bauran industri bernilai positif ($Mij > 0$) pada beberapa sektor dan bauran industri bernilai negatif ($Mij < 0$) di lain sektor. Sektor-sektor yang memiliki nilai positif, antara lain: 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Pengadaan Air; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Real Estate; dan 6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut cepat pada 5 provinsi tersebut.

Sektor-sektor yang memiliki nilai negatif antara lain: 1) Industri Pengolahan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6) Transportasi dan Pergudangan; 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 8) Jasa Keuangan; 9) Jasa Perusahaan; 10) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 11) Jasa Pendidikan; dan 12) Jasa lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut lambat pada 5 provinsi tersebut.

2.4 Regional Shares Effect

Regional Shares Effect dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Regional Shares Effect (dalam milliar)

SEKTOR	PROVINSI				
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatera Utara
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(96,740)	5,289	(229)	2,731	(9,526)
Pertambangan dan Penggalian	9,339	(212)	1	(2,467)	(41)
Industri Pengolahan	(9,154,098)	(2,069)	1,276	(3,111)	992
Pengadaan Listrik, Gas	(176,254)	(94)	13	57	17
Pengadaan Air	(7,048)	19	1	9	(3)
Konstruksi	(3,494,773)	(1,062)	243	(164)	687
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(6,845,171)	(2,470)	(1,173)	(4,030)	252
Transportasi dan Pergudangan	871,995	2,154	(2,741)	327	718
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(3,437,066)	429	182	800	224
Informasi dan Komunikasi	2,107,139	6,560	994	315	(255)
Jasa Keuangan	324,450	(495)	(31)	131	16

Real Estate	(908,900)	(392)	(218)	(10)	(131)
Jasa Perusahaan	3,010,234	(562)	(16)	(14)	63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,527,821	(33)	159	671	397
Jasa Pendidikan	906,984	1,340	423	491	244
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	453,017	(505)	118	210	(50)
Jasa lainnya	276,367	(1,505)	(139)	(1,263)	43
TOTAL	(13,000,000)	6,392	(1,138)	(5,317)	(6,353)

Regional shares effect menggambarkan keunggulan kompetitif sektoral. Karakteristik nilai *regional shares* (Cij) pada kelima provinsi cukup bervariasi. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan setiap provinsi dalam memproduksi. Nilai *regional shares* (Cij) bernilai positif, berarti *sektor i* pada wilayah provinsi dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya, namun jika nilai *regional shares* (Cij) bernilai negatif, berarti *sektor i* pada wilayah provinsi tidak dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya.

a. Efek Pertumbuhan Nasional

Efek pertumbuhan nasional (*Regional Growth Effect*). Secara keseluruhan seluruh sektor di kelima provinsi bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara negatif dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional di kelima provinsi. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan nasional secara umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan semua sektor pembangunan di Indonesia.

Kebijakan nasional terkait pandemi koronavirus yang sangat berdampak pada perekonomian Indonesia adalah kebijakan terkait Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) yang berkembang menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial tentu saja berdampak pada keputusan perusahaan dalam mempekerjakan karyawan mereka. Banyak karyawan yang akhirnya diputuskan untuk bekerja di rumah atau dirumahkan.

Kondisi ini akan berdampak pada output yang akan dihasilkan perusahaan. Dengan hasil perhitungan Gij yang rata-rata negatif. Artinya kebijakan nasional terkait penanganan pandemi koronavirus sangat berdampak pada semua sektor secara negatif. Inilah yang akhirnya menjadi dilema bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan, apakah memilih satu alternatif penanganan pandemi, yakni mengutamakan kesehatan dengan mengorbankan perekonomian sehingga perekonomian menjadi krisis, atautkah memilih alternatif lain, yakni mengutamakan perekonomian dengan mengorbankan kesehatan, yang artinya akan semakin banyak korban meninggal akibat penanganan yang tidak tepat.

Berdasarkan hasil analisis, semua sektor terdampak negatif akibat kebijakan nasional penanganan pandemi koronavirus. Dengan demikian, pemerintah perlu mengambil tindakan percepatan pemulihan semua sektor ekonomi. Bagaimana pemerintah tetap mengutamakan penanganan keduanya, baik kesehatan maupun ekonomi, sehingga keduanya tetap berjalan. Salah satu rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan disiplin protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat bekerja seperti biasa walaupun dengan ketidaknyamanan. Dengan demikian, angka korban meninggal tidak bertambah dan kedua hal tersebut dapat berjalan dengan kebiasaan normal yang baru (*new normal*).

b. Efek Pertumbuhan Nasional

Efek bauran industri (*Industry Mix Effect*). Nilai bauran industri di kelima provinsi Indonesia memiliki karakteristik sektoral yang sama. Bauran industri bernilai positif pada beberapa sektor dan bauran industri bernilai negatif di lain sektor. Sektor-sektor yang memiliki nilai bauran industri positif antara lain: 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pertambangan dan Penggalian; 3) Pengadaan Air; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Real Estate; dan 6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut cepat pada 5 provinsi tersebut. Berdasarkan karakteristik sektor-sektor yang memiliki nilai bauran insutri positif, sektor-sektor tersebut masih berjalan dengan baik atau cepat karena sektor-sektor tersebut masih dapat berjalan pada masa pandemi koronavirus. Artinya, pandemi koronavirus tidak begitu berdampak besar bagi keenam sektor tersebut.

Sektor-sektor yang memiliki nilai bauran industri negatif antara lain: 1) Industri Pengolahan; 2) Pengadaan Listrik, Gas; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 6)Transportasi dan Pergudangan; 7) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 8) Jasa Keuangan; 9) Jasa Perusahaan; 10) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 11) Jasa Pendidikan; dan 12) Jasa lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut lambat pada 5 provinsi tersebut. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut cepat pada 5 provinsi tersebut.

Berdasarkan karakteristik sektor-sektor yang memiliki nilai bauran insutri negatif, sektor-sektor tersebut tidak dapat berjalan dengan baik atau lambat karena sektor-sektor tersebut tidak dapat

berjalan pada masa pandemi koronavirus. Artinya, pandemi koronavirus berdampak besar bagi kedua belas sektor tersebut. Hasil analisis ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah strategis dalam penentuan kebijakan daerah secara sektoral, yang fokus pada percepatan pertumbuhan produktivitas kedua belas sektor tersebut.

Jika dilihat dari karakteristiknya, sektor-sektor tersebut memerlukan banyak keterlibatan tenaga kerja yang bertolak belakang dengan kebijakan penanganan pandemi koronavirus yang mengharuskan pembatasan sosial. Dukungan penyediaan fasilitas pendukung untuk penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat diperlukan agar sektor-sektor tersebut mampu beraktivitas kembali dan menghasilkan output. Tentu saja, dukungan penyediaan fasilitas pendukung tidak hanya terkait kebijakan pengetatan penerapan protokol kesehatan saja, akan tetapi perlu *refocusing* anggaran daerah yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan supaya mereka memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

c. Efek Keunggulan Kompetitif

Efek keunggulan kompetitif (*Regional Shares Effect*). Karakteristik nilai *regional shares* pada kelima provinsi cukup bervariasi. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan setiap provinsi dalam memproduksi. Nilai *regional shares* bernilai positif, berarti *sektor i* pada wilayah provinsi dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya, namun jika nilai *regional shares* bernilai negatif, berarti *sektor i* pada wilayah provinsi tidak dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya. Tentu saja hal ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah berbeda.

Selain itu, kebijakan perekonomian daerah juga berpengaruh. Masing-masing pemerintah daerah memiliki target fokus pengembangan daerahnya masing-masing. Walaupun suatu daerah memiliki suatu potensi sumber daya tertentu yang melimpah, akan tetapi jika pemerintah daerah tidak menjadikannya target fokus pembangunan ekonomi maka potensi sumber daya yang melimpah tersebut tidak memberi manfaat yang optimal.

2.5 Total Effect

Total Effect dapat dilihat pada Table 2.4.

Tabel 2.4 Total Effect (dalam miliar)

SEKTOR	PROVINSI				
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatera Utara
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(1,400)	11,200	6,916	12,295	(306)
Pertambangan dan Penggalian	(21,370)	(490)	(241)	(3,430)	(122)
Industri Pengolahan	(13,327,870)	(14,220)	(5,259)	(12,815)	(878)
Pengadaan Listrik, Gas	(388,550)	(280)	(25)	(98)	(8)
Pengadaan Air	(6,330)	20	2	11	(2)
Konstruksi	(11,515,720)	(5,810)	(3,464)	(5,851)	(1,793)
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(12,819,640)	(7,240)	(4,077)	(10,256)	(1,738)

Transportasi dan Pergudangan	(5,017,570)	(4,100)	(5,780)	(3,923)	(1,511)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(9,487,840)	(2,100)	(1,994)	(5,149)	(634)
Informasi dan Komunikasi	5,600,790	7,560	1,848	1,939	6
Jasa Keuangan	(2,476,580)	(1,030)	(415)	(453)	(199)
Real Estate	(841,060)	(380)	(207)	7	(118)
Jasa Perusahaan	(3,299,760)	(850)	(179)	(556)	(142)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,732,780	(900)	(575)	(332)	(112)
Jasa Pendidikan	(1,579,000)	150	(704)	(808)	(63)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203,380	(600)	47	120	(91)
Jasa lainnya	(2,747,150)	(2,860)	(851)	(2,247)	(74)
TOTAL	(55,992,890)	(21,930)	(14,959)	(31,546)	(7,785)

Nilai *total effect* (Rij) menggambarkan apakah suatu sektor di suatu provinsi tergolong progresif atau konservatif. Berdasarkan hasil analisis, karakteristik nilai *total effect* bervariasi pada tiap sektor di tiap provinsi. Nilai *total effect* positif, hal ini berarti bahwa suatu sektor di suatu provinsi tergolong progresif. Nilai *total effect* negatif, hal ini berarti bahwa suatu sektor di suatu provinsi tergolong konservatif.

Hasil analisis sektor ekonomi menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 memberi dampak pada pergeseran sektoral di Indonesia khususnya di kelima provinsi yang diteliti. Secara khusus terkait unsur-unsur analisis *Shift Share* ditemukan bahwa: 1) Secara keseluruhan seluruh sektor di kelima provinsi, nilai $G_{ij} < 0$. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara negatif dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional di kelima provinsi; 2) Nilai M_{ij} menggambarkan bauran industri di kelima provinsi Indonesia memiliki karakteristik sektoral yang sama. Bauran industri bernilai positif ($M_{ij} > 0$) pada beberapa sektor dan bauran industri bernilai negatif ($M_{ij} < 0$) di lain sektor; 3) Karakteristik nilai *regional shares* (C_{ij}) pada kelima provinsi cukup bervariasi. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan setiap provinsi dalam memproduksi. Nilai *regional shares* (C_{ij}) bernilai positif, berarti *sektor i* pada wilayah provinsi dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya. Namun jika nilai *regional shares* (C_{ij}) bernilai negatif, berarti *sektor i* pada wilayah provinsi tidak dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya; 4) Karakteristik nilai *total effect* bervariasi pada tiap sektor di tiap provinsi. Nilai *total effect* positif, hal ini berarti bahwa suatu sektor di suatu provinsi tergolong progresif. Nilai *total effect* negatif, hal ini berarti bahwa suatu sektor di suatu provinsi tergolong konservatif.

Efek total (*Total Effect*). Efek total adalah dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai *total effect* (R_{ij}) menggambarkan apakah suatu sektor di suatu provinsi tergolong progresif atau konservatif. Berdasarkan hasil analisis, karakteristik nilai *total effect* bervariasi pada tiap sektor di tiap provinsi. Nilai *total effect* positif, hal ini berarti bahwa suatu sektor di suatu provinsi tergolong progresif. Nilai *total effect* negatif, hal ini berarti bahwa

suatu sektor di suatu provinsi tergolong konservatif.

Berdasarkan hasil analisis data, beberapa sektor yang terdapat nilai *total effect* bernilai positif antara lain: Pengadaan Air, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hanya satu sektor yang nilai *total effect*-nya positif pada semua provinsi, yakni sektor Informasi dan Komunikasi. Di masa pandemi koronavirus masyarakat dipaksa untuk banyak bekerja di rumah dan menggunakan kemajuan digital untuk menunjang pekerjaannya. Tentu saja, berdasarkan karakteristik sektoral sektor Informasi dan Komunikasi tidak asing dengan digitalisasi sehingga nilai *total effect* dari pandemi koronavirus terhadap sektor ini positif.

Pada awal masa pandemi, masyarakat masih *shock* atas peristiwa yang ada. Namun, dengan berjalannya waktu mereka mulai terbiasa dengan penggunaan digital untuk pekerjaan mereka. Hal yang dapat direkomendasikan adalah percepatan penggunaan digitalisasi di semua sektor ekonomi. Penyediaan fasilitas pendukung diperlukan karena peneliti percaya bahwa digitalisasi akan terus digunakan untuk menunjang kehidupan manusia di semua sektor. Para ahli menyebutnya dengan era revolusi industri 4.0. Penggunaan digital akan menunjang percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi koronavirus.

2.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 memberi dampak pada pergeseran sektoral di Indonesia, khususnya di kelima provinsi yang diteliti. Secara khusus terkait unsur-unsur analisis *Shift Share* ditemukan bahwa: 1) secara keseluruhan seluruh sektor di kelima provinsi, nilai efek pertumbuhan nasional negatif; 2) nilai bauran industri, di

kelima provinsi memiliki karakteristik sektoral yang sama. Bauran industri bernilai positif pada beberapa sektor dan bauran industri bernilai negatif di lain sektor; 3) nilai *regional shares* pada kelima provinsi cukup bervariasi. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kemampuan setiap provinsi dalam memproduksi; 4) karakteristik nilai *total effect* bervariasi pada tiap sektor di tiap provinsi. Nilai *total effect* positif, hal ini berarti bahwa suatu sektor di suatu provinsi tergolong progresif. Nilai *total effect* negatif, hal ini berarti bahwa suatu sektor di suatu provinsi tergolong konservatif.

Pemerintah perlu mengambil tindakan percepatan pemulihan semua sektor ekonomi. Bagaimana tetap mengutamakan penanganan kesehatan maupun ekonomi sehingga keduanya tetap berjalan. Rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan disiplin protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat, penyediaan fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan yang ketat, *refocusing* anggaran daerah, penentuan target fokus pembangunan ekonomi daerah dan percepatan penggunaan digitalisasi di semua sektor ekonomi.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian ini belum memasukkan unsur aglomerasi ekonomi. Jika ada peneliti yang tertarik meneliti lebih lanjut, mungkin bisa ditambahkan terkait unsur aglomerasi ekonomi. •

Bagian 3

Peran Pemerintah dan Kebijakannya

oleh Nurul Hanifa

3.1 Analisis Ekonomi Publik

Analisis ekonomi publik dilakukan untuk melihat peranan pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Ekelund and Hebert (1997) mengemukakan, “*Modern public choice is a study of the political mechanism or institutions through which taxes and expenditures are determined; that is, it is a study of the demand for and supply of public goods*”.

Analisis ekonomi publik masa pandemi COVID-19 dilakukan untuk menganalisis kebijakan apa sajakah yang sudah dilakukan pemerintah dan mengkaji bagaimana efektivitas kebijakan yang sudah dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan ditinjau dari aspek ekonomi publik dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat dari sisi penerimaan baik yang dilihat dari penerimaan pajak dan kebijakannya dan juga dari sisi pengeluaran pemerintah dalam belanja negara selama masa pandemi COVID-19 yang tercakup dalam APBN 2020 terhitung dari April – Juli 2020.

3.2 Peran Pemerintah dan Kebijakannya

Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia memengaruhi beberapa sektor di Indonesia, salah satunya sektor ekonomi. Berbagai kebijakan pemerintah digunakan untuk mengatasi masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020. Dalam jurnal penelitian oleh Harirah dan Rizaldi (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah ditentukan oleh respons masyarakat terhadap kebijakan. Dalam hal penanganan COVID-19 di Indonesia, kebijakan negara dengan nalar rasional akan mampu diterima secara rasional pula oleh masyarakat jika pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menjamin tersedianya sumber daya ekonomi bagi masyarakat. Peran pemerintah sebagai alokasi,

distribusi, dan stabilisasi sangat diperlukan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ahli ekonomi publik Abad XX, Richard A. Musgrave berpendapat bahwa pemerintah mempunyai tiga peran dalam perekonomian.

Peran Stabilisasi. Pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian berada dalam *full employment* (kesempatan kerja penuh) dan harga-harga stabil. Selama wabah pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia terhitung April-Juli ini. Peran stabilisasi pemerintah adalah pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan agar di tengah situasi penyebaran COVID-19 seluruh harga bahan pangan tetap terjangkau di masyarakat mulai dari sisi stok, ketersediaan pasokan, distribusi sampai stabilisasi harga. Dari sisi stok, pemerintah setiap satu minggu sekali terus melakukan rapat koordinasi dengan menteri membahas mengenai monitoring seluruh bahan pangan pokok. Sedangkan dari ketersediaan pasokan, pemerintah telah melibatkan banyak sektor pengusaha utamanya yang bergerak di sektor riil yang menjamin pasokan bahan baku pangan. (Sumber: *Merdeka.com*, diakses 1 Oktober 2020).

Pentingnya menjaga protokol kesehatan menurut WHO dengan menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* saat COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal maret 2020. Hal itu membuat masyarakat berbondong-bondong membeli masker dan sabun pencuci tangan atau *hand sanitizer*. Anjuran WHO ini membuat beberapa masyarakat melakukan *panic buying* untuk masker dan *hand sanitizer* sehingga barang-barang tersebut mulai langka di pasar karena diborong oleh pembeli dan spekulan. Bahkan, tidak hanya masker dan sabun cuci tangan atau *hand sanitizer* saja, para pembeli juga ramai-ramai men-*stock* kebutuhan pokok di pasar sehingga harga bahan pokok

menjadi tidak terkendali di pasar dan terjadi kelangkaan di pasar akibat *panic buying* ini. Upaya dari para pembeli ini diakibatkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak perlu memborong semua bahan pokok, masker, dan lain-lain agar *stock* dan harga-harga kembali menjadi stabil di pasar.

Sedangkan dilihat dari peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran selama Pandemi COVID-19 adalah mulai dari *re-focusing* anggaran hingga perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja. Dilansir oleh *news.ddtc.co.id* per 1 Juli 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan tiga strategi pemerintah dalam mengatasi pengangguran di masa Pandemi COVID-19, yaitu melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan (BLK) Tanggap COVID-19. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan tetapi juga insentif pascapelatihan.

Selama pandemi COVID-19 sejumlah BLK dialihfungsikan menjadi dapur umum dan sentra produksi alat pencegahan penyebaran COVID-19, seperti *hand sanitizer*, alat pelindung diri, masker wastafel *portable*, serta produk makanan olahan. Seluruh hasil produksi BLK disistribusikan secara gratis oleh masyarakat yang terdampak pandemi. Strategi kedua adalah program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19, seperti program padat karya dan kewirausahaan. Strategi ketiga adalah membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja atau buruh demi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

Ketiga strategi ini selaras dengan enam aspek dalam pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan oleh pemerintah untuk

mengatasi pandemi COVID-19. Misalnya, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar dapat bertahan di masa pandemi sehingga tetap mampu mempekerjakan pegawainya, intensif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah dan keringanan bunga kredit bagi para pekerja di sektor formal, dan program jaring pengaman sosial untuk membantu para pekerja formal maupun pekerja informal serta memprioritaskan kartu prakerja bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.

Sementara itu, mengacu pada data BPS (2020), jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2020 lalu sebanyak 6,88 juta orang. Data terakhir pada Juli 2020, jumlah pengangguran di Indonesia melonjak hingga lebih dari 10 juta orang. Jumlahnya naik tajam sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada Maret lalu. Artinya, angka pengangguran bertambah sekitar 3,7 orang akibat COVID-19 sejak Februari 2020. Dari data-data tersebut membuktikan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia sampai saat ini belum dapat mengatasi pengangguran di Indonesia.

Peran Alokasi. Upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah dapat melaksanakan peran ini secara langsung (misalnya dalam belanja barang untuk keperluan pertahanan dan pendidikan), atau secara tidak langsung yaitu melalui pajak dan subsidi untuk mendorong kegiatan-kegiatan tertentu dan menghambat kegiatan lainnya. Peran alokasi oleh pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang publik agar tidak terjadi kegagalan pasar, karena dalam sistem perekonomian suatu negara tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar.

Peningkatan belanja pemerintah dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan peran pemerintah sebagai

upaya untuk mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Dengan semakin besarnya belanja pemerintah maka kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi penyediaannya oleh sektor swasta dapat dinikmati melalui penyediaannya oleh pemerintah. Namun, kecenderungan peningkatan belanja pemerintah ini tidak serta merta berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah yang tidak tepat.

Apabila alokasi belanja pemerintah tidak menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat maka tidak akan terjadi *multiplier effect* yang positif pada perekonomian. Selain itu, belanja pemerintah rentan dengan pemborosan dan inefisiensi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengutamakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya di berbagai wilayah agar pembangunan wilayah bisa berjalan melalui perencanaan anggaran yang tepat guna. Belanja yang tidak terencana dan tidak terkendali dengan baik akan menjadi sumber inefisiensi dan pemborosan uang negara yang sangat merugikan masyarakat (Mahmudi, 2010).

Peran pemerintah secara langsung dalam alokasi sumber daya selama pandemi COVID-19 adalah realokasi anggaran untuk kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa tender, dan kegiatan yang dibatalkan. Selain itu, pemerintah merealokasi kegiatan-kegiatan belanja barang yang tidak mendesak (perjalanan dinas, biaya rapat, penyelenggaraan *event*, honorarium, dan belanja operasional). Adapun data realisasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2020 selama masa pandemi COVID-19 terhitung Maret-Juli 2020 disajikan dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Bulan
Maret-Juli 2020 (dalam Triliun Rupiah)**

Periode	APBN 2020	Realisasi Belanja K/L					Realisasi Belanja Non-K/L		
		Belanja Pegawai dan % Growth (yoy)	Belanja Barang dan % Growth (yoy)	Belanja Modal dan % Growth (yoy)	Bantuan Sosial dan % Growth (yoy)	Total Belanja K/L dan % Growth (yoy)	Pembayaran Bunga Utang dan % Growth (yoy)	Subsidi dan % growth (yoy)	Total belanja Non-K/L dan % Growth (yoy)
Maret	909,62	48,64 (7,95%)	35,19 (-6,62%)	11,95 (32,06%)	47,17 (27,61%)	142,96 (11,03%)	73,84 (4,63%)	18,71 (-14,29%)	134,92 (2,23%)
April	1851,1(*)	68,21 (3,21%)	52,92 (-18,79%)	20,70 (30,56%)	61,41 (13,72%)	203,24 (1,06%)	92,82 (12,37%)	32,83 (-13,47%)	17,67 (6,12%)
Mei	1851,1(*)	95,41 (-4,22)	69,36 (-30,11%)	26,94 (-7,31%)	78,85 (30,71%)	270,57 (-6,13%)	145,71 (14,66%)	48,89 (-3,36%)	266,76 (9,97%)
Juni	1975,2 (*)	114,1 (-3,3)	99,2 (-16,8%)	37,7 (8,7%)	99,4 (41,0%)	350,4 (2,4%)	157,6 (16,9%)	70,8 (-1,4%)	318,1 (10,3%)
Juli	1975,2 (*)	256,6 (-10,5%)	271,7 (-17,0%)	137,4 (-3,3%)	117,0 (55,8%)	419,6 (0,0%)	182,8 (15,2%)	83,6 (-9,3%)	374,0 (9,5%)

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah oleh penulis, 2020)

Ket: (*) Perubahan APBN Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020

Dari Tabel 3.1, secara umum realisasi belanja pemerintah pusat penurunan yang paling signifikan ditunjukkan pada realisasi belanja barang dan subsidi dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Peran pemerintah pusat dalam alokasi selama pandemi COVID-19 pada awal Maret 2020 terjadi penurunan realisasi belanja barang sebesar 6,62% pada belanja barang operasional atau nonoperasional serta belanja perjalanan karena semakin meluasnya dampak pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Jakarta, sehingga berdampak pada penundaan kegiatan pada beberapa program dan kegiatan belanja barang K/L. Selain itu, sebagai upaya untuk menangani dampak pandemi, pemerintah juga melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran K/L dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Sementara itu, realisasi belanja barang pada April-Mei tumbuh negatif masing-masing sebesar 18,79 persen (yoy) dan 30,11 persen (yoy). Ini juga disebabkan oleh semakin meluasnya pandemi COVID-19 sehingga beberapa program atau kegiatan pada K/L tidak bisa dilaksanakan, terutama pada belanja perjalanan dinas, belanja operasional lainnya, honor kegiatan, dan belanja barang diserahkan kepada masyarakat atau pemda. Selain hal tersebut, pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada pelaksanaan tugas perkantoran yang harus dilakukan dari rumah (*Work From Home/WFH*) sehingga sangat berpengaruh terhadap menurunnya pelaksanaan program atau kegiatan pada K/L selama kebijakan PSBB masih diberlakukan.

Efisiensi belanja barang yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi COVID-19 ini masih menjadi penyebab turunya realisasi belanja barang pada Juni-Juli 2020 yang masing-masing sebesar 16,8 persen dan 9,3 persen. Selain itu, pada periode ini pemerintah juga mulai menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional yang tepat dan cepat dalam mengatasi pandemi ini dan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha yang utamanya bergerak di sektor industri padat karya.

Upaya pemerintah dalam megalokasikan sumber daya dalam masa pandemi COVID-19 melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah merupakan salah satu kunci awal respons yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi masalah wabah pandemi ini. Beberapa detail kebijakan yang dibuat pemerintah pusat ini seperti mengurangi belanja barang untuk Kementerian/Lembaga untuk dialihkan ke penambahan belanja dalam bidang kesehatan dan perlindungan sosial dalam rangka penyediaan barang publik untuk mendukung program pe-

mulihan ekonomi nasional. Namun, realokasi belanja pemerintah ini khususnya pemotongan belanja barang yang semakin menurun yang dialihkan pada penanganan COVID-19 ini juga harus melibatkan lembaga-lembaga pengawas keuangan, terutama kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Peran distribusi. Peran yang dijalankan pemerintah untuk menjamin agar pendapatan dalam perekonomian dapat terdistribusi ke seluruh masyarakat dalam perekonomian. Pemerintah menjalankan fungsi redistribusi melalui instrumen pajak dan subsidi. Hal ini berkaitan dengan masalah-masalah pemerataan dan efisiensi. Data terakhir dari Kemenkeu (2020), penerimaan pajak, memasuki semester kedua tahun 2020 ini, penerimaan pajak untuk periode Januari-Juli telah terkumpul sebesar Rp601,91 T. Capaian ini setara dengan 50,21 persen dari target penerimaan pajak tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp1.198,82 T. Penerimaan pajak ini mengalami kontraksi sebesar 14,67 persen (YoY). Kondisi ini disebabkan perlambatan perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 dan perlambatan aktivitas ekspor-impor seiring lemahnya perdagangan internasional.

Sebagaimana dirilis BPS, ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen. Di sisi lain, intensif fiskal dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagai bagian dari skema pemuliahan ekonomi nasional (PEN) juga mengakibatkan tekanan tambahan pada kinerja penerimaan pajak, tekanan terutama dirasakan pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan pada pajak-pajak atas impor. Hal ini disebabkan pada PPh Pasal 25/29 perlambatan profitabilitas usaha tahun lalu, pemberian insentif perpajakan dalam bentuk penurunan tarif PPh

Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, serta pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen. Sedangkan penurunan pada pajak atas impor disebabkan oleh perlambatan aktivitas impor, insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan penurunan penjualan kendaraan bermotor.

Sesuai dengan fungsi pajak menurut Mardiasmo (2006), pajak mempunyai fungsi sebagai anggaran, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarnya. Selain itu fungsi pajak juga sebagai fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi pajak sebagai anggaran dan mengatur, penerimaan pajak di sebuah negara diharapkan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya demi peningkatan pemerataan pembangunan.

Dari potret penerimaan pajak yang mengalami penurunan mulai sejak masuknya pandemi COVID-19 ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar untuk membiayai pembangunan. Maka dari itu, diperlukan strategi kebijakan untuk kembali memulihkan perekonomian nasional khususnya dalam penerimaan pajak setelah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini pun belum dapat diketahui kapan akan berakhir. Hal ini sejalan dengan penelitian Cheisviyanny (2020) mengenai strategi dalam memulihkan penerimaan pajak pascapandemi COVID-19 berupa saran yang diusulkan, yaitu: (1) optimalisasi mekanisme *withholding tax*, (2) pengenaan PPh final untuk wajib pajak non-UMKM, dan (3) efisiensi biaya pemungutan pajak, meskipun usulan penelitian ini masih membutuhkan kajian yang mendalam sebelum diimplementasikan.

Selain itu peran distribusi pemerintah dalam belanja subsidi

yang dapat dilihat dalam tabel 1 di mana realisasi subsidi sampai dengan Maret 2020 mencapai Rp18,71 triliun di mana tingkat pertumbuhan per tahun -14,29%. Pada periode yang sama dimanfaatkan seluruhnya untuk subsidi energi. Selain dipengaruhi oleh realisasi asumsi ICP dan nilai tukar, realisasi subsidi energi juga dipengaruhi oleh realisasi pembayaran subsidi. Realisasi subsidi hingga Maret 2020 sampai saat ini digunakan untuk pembayaran tagihan JBT minyak tanah, LPG tabung 3 kg, dan tagihan listrik pada Januari-Februari 2020 (Kemenkeu, 2020). Sedangkan penurunan realisasi subsidi sampai dengan April 2020 sebesar 13,47 persen (yoy) dipengaruhi oleh proses administrasi dan verifikasi dalam proses penagihan subsidi dan juga dipengaruhi oleh realisasi ICP, CP Aramco, dan nilai tukar rupiah.

Sementara itu menutup pertengahan tahun dalam perekonomian Indonesia, data penurunan realisasi belanja subsidi pada akhir Juni 2020 sebesar 1,43 persen (yoy) ini dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan komposisinya, realisasi belanja subsidi ini terdiri dari subsidi energi, subsidi energi dan subsidi nonenergi yang di dalamnya termasuk subsidi pajak yang dipengaruhi oleh realisasi stimulus PPh dalam rangka COVID-19. Demikian pula dalam memasuki awal semester II 2020 pada Juli 2020, realisasi belanja subsidi masih mengalami penurunan sebesar 9,3 persen yang masih dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak mentah (ICP) sebagai akibat lebih rendahnya asumsi ekonomi makro yang menjadi parameter perhitungan subsidi (ICP), termasuk realisasi volume barang bersubsidi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Respons pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 sebagai peran distribusinya selama masa pandemi COVID-19 ini

dengan melakukan kebijakan penetapan pajak yang relatif progresif. Dilansir oleh DDTCNews per April 2020, pada awalnya pandemi masuk ke Indonesia pemerintah menggunakan pajak untuk memitigasi efek wabah koronavirus terhadap perekonomian. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah ingin menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu yang terdampak pandemi COVID-19.

Ada beberapa insentif pajak yang diberikan pemerintah, yaitu penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22 %, pemajakan atas transaksi elektronik, dan melakukan perpanjangan jangka waktu permohonan atau penyelesaian administrasi perpajakan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan instrumen pajak untuk mendukung ketersediaan barang dan jasa terkait obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan wabah koronavirus. Ketentuan ini terdapat dalam PMK No. 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.

Dari sejumlah insentif pajak, kebijakan pajak, dan menggunakan instrumen pajak untuk mendukung penyediaan barang dan jasa publik yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah akibat pandemi COVID-19 ini. Fungsi pajak ini lebih condong kepada fungsi *reguler* (pengatur) daripada *budgeter* (anggaran). Tidak mengherankan jika target penerimaan pajak dan realisasinya mengalami penurunan dari tahun lalu. Dari data penerimaan pajak dapat terlihat bahwa pajak memainkan peran yang sangat penting, baik dari fungsi *reguler* atau *budgeter*. Dalam konteks pemberian insentif dan sejumlah kelonggaran dalam membayar pajak, pemerintah telah menggunakan instrumen pajak untuk menstimulus perekonomian secara langsung.

Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang akhirnya akan dibelanjakan negara untuk pembangunan. Di sisi lain, pemerintah masih tetap ingin menggali potensi dari pajak ini dengan mengenakan pajak atas transaksi elektronik yang tertuang dalam Perpu 1/2020, di mana kebijakan ini menjadi dilema bagi sektor UMKM yang lebih sering memasarkan produknya secara *online* seiring makin meluasnya wabah pandemi.

Kebijakan subsidi dari pemerintah untuk mengatasi kondisi perekonomian akibat pandemi ini seperti dengan belanja subsidi untuk bunga kredit, di mana pada saat ini mayoritas debitur yang memiliki usaha (pengusaha UMKM) atau sumber penghasilannya yang terdampak COVID-19 berpotensi untuk kesulitan melunasi fasilitas kredit. Kebijakan ini disambut baik oleh sektor perbankan sebab kebijakan ini bukan hanya membantu debitur, namun juga akan memberikan angin segar bagi arus perbankan yang terbilang seret. Selain itu, pemerintah juga melakukan kebijakan subsidi bunga hingga masa angsuran 10 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang melaukan kredit kepemilikan rumah dan bantuan pemberian subsidi uang muka bagi kredit rumah bersubsidi.

Dari pemaparan kebijakan pemerintah terkait insentif pajak dan subsidi, pada teorinya bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara disebabkan karena rendahnya permintaan agregat yang menyebabkan turunnya pendapatan nasional. Cara cepat untuk meningkatkan permintaan agregat yang dapat diambil oleh suatu negara adalah dengan meningkatkan belanja pemerintah dan penurunan pajak yang dapat dilakukan melalui pemberian subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi, sedangkan penurunan pajak melalui pemberian insentif pajak bagi wajib pajak.

Selanjutnya, dengan adanya peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga, kemudian mendorong peningkatan belanja rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga seharusnya sejalan dengan peran pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat secara adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Namun, masalah keadilan ini tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ekonomi karena masalah keadilan tergantung kepada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Dalam masa pandemi COVID-19 ini diharapkan peran pemerintah dalam pendistribusian ini dapat berjalan efektif dan efisien serta memiliki dampak nyata bagi publik yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini.

Peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi COVID-19 memang masih banyak menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun implementasi di lapangan. Namun demikian, mengingat setiap kebijakan yang dilakukan baik itu stimulus fiskal dan sampai saat ini kita kenal dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan mampu menciptakan realisasi yang nyata dalam menyediakan *public goods* yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Adapun urgensi pemerintah dalam percepatan program pemulihan ekonomi nasional ini adalah untuk mencegah agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. •

Bagian 4

Keuangan Daerah

oleh Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah

4.1 Analisis Keuangan Daerah

Analisis keuangan daerah dilakukan untuk melihat aspek keuangan untuk pembiayaan pembangunan daerah dengan membandingkan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah. Kuncoro (2012) mengemukakan bahwa terjadi fenomena ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Akibat ketergantungan ini memberi celah campur tangan yang tinggi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait keputusan-keputusan penting yang akan diambil.

Analisis keuangan daerah masa pandemi COVID-19 dilakukan untuk menganalisis apakah benar terdapat ketergantungan aspek keuangan yang tinggi pada pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Efek ketergantungan tersebut membuat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah menjadi tidak selaras dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga menjadi ketidaknyamanan bagi masyarakat.

4.2 Keuangan Daerah Masa Pandemi

Wabah COVID-19 yang telah menyerang Indonesia sejak Maret 2020 adalah wabah yang sampai saat ini belum dapat tertangani dengan baik. Angka pasien positif koronavirus masih mengalami kenaikan yang signifikan. Menurut data BNPB pasien terkonfirmasi koronavirus sebanyak 282.724 jiwa per 29 September 2020. Banyaknya penambahan kasus pasien yang terkonfirmasi koronavirus dari berbagai provinsi di Indonesia mengindikasikan bahwa wabah ini masif dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sampai saat ini pemerintah belum dapat memprediksi kapan wabah ini akan berakhir. Jika pemerintah tidak serius menangani masalah ini maka harapan masyarakat untuk segera hidup normal akan sirna. Mengingat masa *new normal* yang diberlakukan oleh pemerintah nya-

tanya makin membuat naiknya angka pasien yang terkonfirmasi koronavirus ini.

Provinsi yang memiliki kasus tertinggi terkonfirmasi koronavirus adalah DKI Jakarta. Hal tersebut memaksa pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan PSBB kedua sebagai akibat dari penuhnya kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta yang kewalahan dalam merawat pasien koronavirus. Kebijakan yang disayangkan oleh sebagian pengusaha yang mana kebijakan tersebut akan berdampak pada ekonomi yang mulai menggeliat setelah usainya penerapan PSBB DKI Jakarta yang pertama. Langkah ini ditempuh sebagai akibat dari banyaknya tambahan kasus positif baru, yakni sebanyak 1.233 kasus sehingga total pasien yang terinfeksi di Provinsi DKI menjadi 72.577 orang.

Pemerintah sedang dilema dalam mengatasi wabah COVID-19 mengingat angka pasien terkonfirmasi koronavirus makin hari makin meningkat. Jika di negara lain menerapkan *lock down* total untuk dapat menekan penyebaran COVID-19 dan seluruh masyarakat dianjurkan berada di rumah maka pemerintah Indonesia belum mengambil langkah tersebut mengingat ada dampak besar di sana yang mengancam perekonomian Indonesia. Ada 3 dampak besar yang akan terjadi jika kebijakan *lock down* total diberlakukan.

Dampak pertama adalah konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% perekonomian akan jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data BPS yang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini (BPS:2020). Dampak kedua, ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak yang ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga

menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara menjadi terhenti.

Peningkatan pandemi COVID-19 diprediksi akan mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi pada 2020. Penurunan pertumbuhan ini di antaranya disebabkan oleh pelambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan negara. Secara mikro, pandemi COVID-19 dapat menyerang berbagai organisasi baik organisasi atau instansi yang berskala besar maupun kecil. Pada organisasi atau instansi kecil yang mana mereka kekurangan modal dan sumber daya maka di masa pandemi ini mereka akan kesulitan untuk membiayai kegiatan. Organisasi atau instansi berskala besar akan merasakan dampak karena *fixed cost* yang harus dikeluarkan relatif besar, sedangkan pendapatannya berkurang.

Sektor pemerintahan juga mengalami permasalahan yang sama. Penurunan pendapatan terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. Pada kuartal pertama pandemi COVID-19 belum terasa dampaknya karena masih memanfaatkan dana yang tersimpan. Namun, apabila dampak ini tidak segera berakhir maka dampak keuangan akan mulai dirasakan pada beberapa bulan berikutnya karena penurunan pendapatan yang tajam dan masalah likuiditas. Oleh karena itu, instansi pemerintah pusat maupun daerah bekerja sama dalam penanggulangan pandemi ini dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di kesehatan dan sosial.

4.3 Perubahan Postur APBN di Masa Pandemi

Pandemi koronavirus yang melanda di berbagai belahan dunia memaksa pemerintah menyusun kebijakan yang tidak biasa (*extraordinary*) agar status ekonomi dan kesehatan tidak semakin

parah. Salah satu kebijakan besar yang dilakukan oleh pemerintah adalah memangkas Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran yang dipangkas akan digunakan untuk penanganan koronavirus dan penyaluran stimulus ekonomi kepada masyarakat yang terdampak. APBN Indonesia akan dipangkas sebanyak 2 kali untuk menyesuaikan kondisi Indonesia di masa pandemi. Ketidakpastian lamanya krisis wabah COVID-19 baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi memaksa pemerintah menghitung ulang biaya yang diperlukan untuk menahan dampak yang ditimbulkan dari wabah COVID-19 agar tidak semakin dalam. Untuk itu pemerintah menganggarkan total 677,20 triliun untuk bidang kesehatan dalam rangka menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk penyesuaian postur APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020 dan Perpres Nomor 72/2020. Revisi kedua dilakukan setelah sebelumnya pada Perpres Nomor 54/2020, defisit APBN melebar dari batas maksimal sehingga pada Perpres yang baru batas tersebut dinaikkan lagi. Perpres 54/2020 akan direvisi untuk mencerminkan kebutuhan yang diantisipasi sampai akhir tahun. Direvisinya Perpres Nomor 54/2020 karena ada pelebaran defisit APBN akibat dari penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi 1.039,2 Triliun atau 6,34 persen dari PDB.

Tabel 4.1 Data Perubahan Postur APBN

Keterangan	Perpres 54/2020	Perpres 72/2020
Pendapatan negara	1.760,9 T	1.699,9 T
Perpajakan	1.462,6 T	1.404,5 T
PNBP	297,8 T	2.94,1 T
Belanja Negara	2.613,8 T	2.739,2 T

Pemerintah Pusat	1.851,1 T	1.975,2 T
TKDD	762,7 T	763,9 T
Pembiayaan	852,9 T	1.039,2 T

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Perubahan postur APBN tersebut di atas adalah penyesuaian dari Perpres Nomor 54/2020 ke Perpres Nomor 72/2020 yang mana tujuannya adalah untuk penguatan penanganan COVID-19 dan fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Ada tiga komponen pokok yang disesuaikan dalam postur APBN, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan negara dikoreksi dari 1.760,9 triliun turun menjadi 1.699,9 triliun. Pendapatan yang bersumber dari pajak yang semula 1.462,6 triliun dikoreksi turun menjadi 1.404,5 triliun dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dikoreksi turun yang semula 297,8 triliun menjadi 294,1 triliun. Pendapatan negara dikoreksi turun karena ada kebijakan perluasan dan perpanjangan insentif pajak untuk dunia usaha yang diberlakukan sampai dengan Desember 2020. Insentif Pajak tersebut merupakan PPH 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPH 22 dan PPN impor (alat kesehatan) dan percepatan restitusi PPN. Stimulus kebijakan ini diambil dalam rangka penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Perubahan pada postur belanja negara yang semula 2.613,8 triliun dikoreksi naik menjadi 2.739,2 triliun. komponen APBN belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan TKDD (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa). Belanja pemerintah yang semula 1.851,1 triliun dikoreksi naik menjadi 1.975,2 triliun dan TKDD yang semula 762,7 triliun dikoreksi naik menjadi 763,9 triliun. Tambahan belanja negara sekitar 125,4 triliun adalah untuk penanganan koronavirus dan juga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu meliputi subsidi dan imbal jasa penjaminan

UMKM, perpanjangan bansos tunai dan diskon listrik, tambahan DID (Dana Insentif Daerah) untuk pemulihan ekonomi nasional dan belanja penanganan coronavirus lainnya.

Perubahan pada Pembiayaan anggaran dikoreksi naik yang semula 852,9 triliun menjadi 1.039,2 triliun. Hal ini meliputi kebijakan pembiayaan investasi, PMN dan penempatan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19. Untuk menutup defisit APBN 2020, pembiayaan anggaran sebesar 307,2 triliun atau turun 1,15 persen dari *outlook* APBN 2019. Pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) konvensional dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pembiayaan utang tersebut tumbuh negatif sebesar minus 5,88 persen dari *outlook* APBN 2019. Selain itu pembiayaan anggaran juga untuk kegiatan investasi. Pembiayaan investasi 2020 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan, infastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa.

4.4 APBD di Masa Pandemi

Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan akibat dampak-dampak yang ditimbulkan pandemi ini. Penanganan tersebut seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan dari keuangan daerah dan sektor keuangan. Pemerintah menginstruksikan daerah melakukan revisi terhadap APBD daerah sebab penyesuaian anggaran bersifat parsial dan murni berdasarkan diskresi pemerintah yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Penyesuaian anggaran ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi

pandemi COVID-19 yang mulai melanda Indonesia di triwulan pertama 2020.

Pemda harus merevisi APBD daerahnya. Apabila pemda tidak melakukan hal tersebut maka pemerintah akan menunda transfer dana perimbangan yang menjadi bagian daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020, pemda cukup merevisi APBD lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tanpa perlu melewati proses revisi atas Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dari masing-masing daerah. Perlakuan ini sama dengan APBN pemerintah pusat yang langsung direvisi melalui Peraturan Presiden (Perpres) tanpa perlu menggunakan atas UU APBN 2020.

Revisi APBD 2020 harus segera dilakukan dengan prioritas adalah penyelamatan manusia. Prioritas tersebut seperti misalnya anggaran untuk penanganan COVID-19 terutama dalam penyediaan alat kesehatan, alat keselamatan kerja bagi tenaga medis, peningkatan kemampuan rumah sakit dan penambahan ruang isolasi, penyediaan alokasi anggaran untuk insentif tenaga medis yang terlibat dalam menangani wabah COVID-19. Tidak hanya dari segi kesehatan, penanggulangan akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari wabah COVID-19 juga perlu segera diatasi dengan program-program bantuan yang langsung diterima oleh masyarakat.

Pemerintah daerah (Pemda) melakukan rasionalisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan modal sekurang-kurangnya 35%. Pemda juga harus memperhatikan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang ekstrim akibat turunnya aktivitas masyarakat/ekonomi dan perkembangan tingkat pandemi COVID-19 yang perlu ang-

garan penanganan segera di daerah, *refocusing* program atau kegiatan didasarkan pada 3 sasaran, yaitu pencegahan penanganan COVID-19, jaring pengaman social, dan pemulihan ekonomi di daerah (Jaweng Robert:2020).

Setelah dilakukan penyesuaian APBD maka ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, jika tidak maka ada sanksi penundaan DAU (Dana Alokasi Khusus). Sanksi tersebut dikenakan kepada pemda yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD dan pemda yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD namun belum usai sesuai ketentuan SKB Menkeu dan Mendagri 2020 maupun PMK Nomor 35 tahun 2020. Tindak lanjut atas sanksi penundaan DAU harus dilihat sebagai terapikejut bagi pemda. Memastikan bahwa daerah memang memiliki komitmen dan kapasitas bagi penanggulangan koronavirus. Sanksi ini harus ditegakkan jangan hanya teguran semata.

Realokasi anggaran yang cukup serius di dalam APBD tampaknya baru berjalan setelah keluarnya instruksi dari pemerintah pusat. Otoritas anggaran di daerah mulai melihat pentingnya realokasi belanja APBD setelah keluarnya surat kesepakatan bersama antara Menkeu dan Mendagri dengan Nomor 117/KMK.07/2020 dan No.119/2813/SJ. Kewajiban itu dirasakan lebih mengikat karena Kemenkeu mengatakan secara eksplisit bahwa pemda wajib melakukan realokasi anggaran ke sektor strategis untuk penanganan COVID-19 dengan ancaman sanksi yang tegas berikut gambaran realokasi APBD dalam penanganan COVID-19 di Kota Surabaya

Anggaran Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya dalam angka

Pemerintah Kota Surabaya Fokus pada 2 sektor, yaitu jaring pengaman sosial dan kesehatan.

Fokus 2 Sektor

1. Jaring pengaman sosial	= 577.090.962.405
2. Kesehatan	= 242.430.299.635
Total	= 819.521.262.040

Tabel 4.2 Jaring Pengaman Sosial

No	Sumber Dana dan Program	Realisasi s.d Juni	Rencana Realisasi Juli
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara			
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	61.194.950.000	30.783.525.000
	Bantuan pangan nontunai (BPNT) Kemensos	94.760.000.000	22.392.200.000
	Bantuan sosial tunai (BST)	203.406.600.000	106.257.000.000
	Bantuan Presiden	Setara 1.595.000	
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi			
2	Top up program sembako (BPNT)	18.734.600.000	9.367.300.000
	Bantuan langsung tunai	7.639.600.000	9.000.000.000
3	CSR (Sembako)	7.639.600.000	
	Total	577.090.962.405	

Sumber: CNN Indonesia, 2020

Tabel 4.3 Sektor Kesehatan

No	Sumber Dana dan Program	Realisasi s.d Juni	Rencana Realisasi Juli
1	APBN	32.472.750.000	
2	APBD Provinsi	4.915.500.000	
3	CSR (antara lain alat kesehatan, sarana sterilisasi publik dan bahan medis habis pakai)	Setara 48.199.974.643	

4	APBD Surabaya	52.992.170.639	83.254.344.353
5	Pelayanan mobil BIN dan PBNPB Pusat	Setara 20.595.560.000	
	Total	242.430.299.635	

Sumber: CNN Indonesia, 2020

Tabel 4.4 Total Sumber Dana

Total Sumber Dana	
APBN	552.862.025.000
APBD Provinsi	49.657.000.000
CSR (Per 30 Juni 2020)	60.160.162.048
APBD Surabaya	136.246.514.992
Pelayanan mobil BIN dan BPNPB (rapid dan swab tes)	Setara 20.595.560.000
Total	819.521.262.040

Sumber: CNN Indonesia, 2020

Alokasi anggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dialokasikan dengan berbagai program. Untuk program jaring pengaman sosial Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan dari APBN berupa program keluarga harapan yang diberikan kepada 43.499 keluarga tidak mampu sejak Januari-Desember dan direalisasikan per triwulan. Ada juga program sembako dari Kemensos (bantuan pangan nontunai) sebesar 150.000 per bulan yang diberikan kepada 111.961 keluarga tidak mampu pada Januari dan Februari. Pada Maret dan selanjutnya diberikan bantuan sebesar 200.000. Di samping itu ada juga bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan kepada 166.394 keluarga sebesar 600.000 per bulan (Pemerintah Kota Surabaya, 2020).

Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan dari presiden berupa

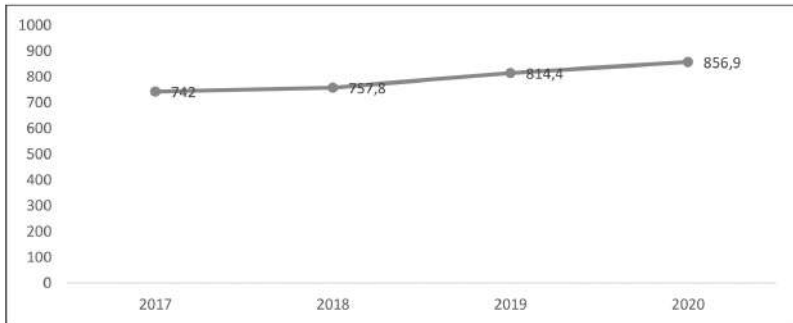
sembako yang diberikan kepada 10ribu keluarga yang nilainya setara 1.595.000.000, sedangkan bantuan dari APBD provinsi berupa *top-up* program sembako (BNPT) diberikan kepada 93.673 keluarga penerima program sembako Kemensos sebesar 100.000 per bulan. Bantuan dari APBD provinsi berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada 38.198 keluarga sebesar 200.000 per bulan. Selain itu Pemkot Surabaya juga mendapat bantuan CSR berupa sembako sebanyak 108.170 paket. (Pemerintah Kota Surabaya, 2020).

Khusus untuk sektor kesehatan, Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD provinsi berupa alat pelindung diri seperti baju hazmat dan masker N95. Anggaran tersebut juga digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, penyediaan obat, sarana kesehatan, penyediaan rumah isolasi dan sarana prasarananya, thermo gun, desinfektan, kelengkapan APD, bilik sterilisasi dan wastafel (Pemerintah Kota Surabaya, 2020).

4.5 Ketergantungan APBD terhadap APBN di Masa Pandemi

Defisit APBN 2020 yang menyebabkan penerimaan perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak, dan penurunan tarif PPH juga PNBP turun akibat jatuhnya harga komoditas membuat pendapatan negara turun 10%. Belanja negara fokus pada kesehatan, *social safety net* dan membantu dunia usaha. Penghematan belanja negara sekitar 190 triliun dan realokasi cadangan 54,6 triliun juga tambahan belanja penanganan COVID-19 sebesar 255,1 triliun. Defisitnya APBN 2020 yang diperkirakan mencapai 5,07 persen dari PDB memaksa pemerintah mengurangi anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkurang dari 856,9 triliun menjadi 762,7 triliun.

Pada APBN 2020 dialokasikan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 856,9 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar 784,9 triliun dan dana desa sebesar 72 triliun. Berikut adalah grafik pertumbuhan TKDD dari tahun ke tahun.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Grafik 4.1 Pertumbuhan TKDD Dari Tahun 2017-2020

Berdasarkan Grafik 4.1, dana TKDD yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya tak terkecuali pada 2020 di masa pandemi COVID-19. Ini adalah komitmen pemerintah pusat untuk tetap memberikan *support* kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Dalam penyaluran TKDD ada program prioritas di dalamnya yaitu program perlindungan sosial, program ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, reformasi Pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana dan infrastruktur di daerah.

Langkah kebijakan transfer ke daerah adalah dengan mentransfer dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus fisik, Dana Alokasi Khusus nonfisik, dana insentif daerah, dana otsus dan dana keistimewaan DIY juga Dana Desa. Dana Bagi Hasil (DBH) senilai 117,6 triliun yang merupakan alokasi digunakan

untuk mendukung program JKN, memperluas penggunaan DBH dana reboisasi, memperkuat implementasi penggunaan 25 persen dana transfer umum untuk belanja infrastruktur dan penyaluran dana bagi hasil ini berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Dana alokasi umum (DAU) adalah bersifat final untuk memberi kepastian pendanaan bagi daerah, kebijakan dukungan pendanaan kelurahan, siltap kepala desa dan perangkat desa juga penggajian pegawai PPPK. Dana alokasi umum ini menyempurnakan formulasi DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan memperkuat implementasi penggunaan 25 persen dana transfer umum untuk belanja infrastruktur. dana alokasi umum 2020 dianggarkan sebesar 427,1 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2020).

Dana alokasi khusus fisik yang diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik, memperkuat kebijakan afirmasi, melakukan restrukturisasi bidang DAK fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis regular ke jenis penugasan. Dana alokasi khusus ini dianggarkan sebesar 72,2 triliun rupiah, sedangkan dana alokasi khusus nonfisik adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah, meingkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran dan menyempurnakan unit *cost* BOS (naik) juga pemutakhiran data penerima. Alokasi dana khusus nonfisik ini dianggarkan sebesar 130,3 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2020).

Dana insentif daerah yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah juga penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID di daerah. DID ini dianggarkan sebesar 15 triliun rupiah. Sedangkan dana otsus dan dana keistimewaan DIY adalah untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus dan tambahan infrasturktur Prov. Papua dan Papua

Barat dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran juga meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dana keistimewaan DIY. Dana otsus dan Keistimewaan DIY ini dianggarkan sebesar 22,7 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2020).

Langkah kebijakan dana desa merupakan penyempurnaan kebijakan pengalokasian dengan penyesuaian bobot alokasi dasar (AD) dan alokasi formula (AF) dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan, pemberian alokasi afirmasi (AA) kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi serta pemberian alokasi kinerja (AK) kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dan meningkatkan porsi penggunaan dana desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Dana desa dianggarkan sebesar 72 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2020).

Ketergantungan daerah kepada APBN pemerintah masih sangat tinggi. Hal ini tercermin dalam TKDD yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN setiap tahunnya mengalami kenaikan. Secara rata-rata nasional, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1 persen, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87 persen. Pengelolaan APBN dan APBD akan sangat memengaruhi perekonomian Indonesia, begitu juga sebaliknya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah daerah sejatinya harus mengalokasikan APBD untuk penanganan COVID-19, juga mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dengan efektif dan efisien.

Pemerintah daerah juga masih harus memaksimalkan penerimaan PAD daerahnya agar tetap baik dan dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun pemu-

lihan ekonomi masyarakat di daerahnya. Sejatinya pemda memiliki dua tugas penting, yaitu mengelola APBD secara efisien, tepat kualitas, dan membawa dampak positif. Kedua adalah menciptakan kebijakan yang dapat menarik modal dan investasi untuk bisa ditanamkan ke daerah masing-masing sehingga membuka lebih banyak kesempatan kerja. •

Bagian 5

Dilema Kebijakan, Pilihan Sulit

oleh Hendry Cahyono

5.1 Analisis Ekonomi Kelembagaan

Analisis ekonomi kelembagaan dilakukan untuk melihat bagaimana perekonomian dijalankan secara utuh yang saling berkaitan dengan ilmu sosial yang lain. Santosa (2008) mengemukakan, “*Ekonomi kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan hukum. Mereka merangkum hal tersebut dalam analisis ekonomi, namun demikian di antara mereka masih mempunyai ragam dan variasi pandangan*”.

Thorstein Veblen dalam Pressman (2000) mengemukakan dengan menggunakan pandangan dari ilmu sosial lainnya, perilaku manusia terlihat tidak rasional. Perilaku manusia cenderung mengikuti kebiasaan dan adat istiadat dibandingkan memaksimalkan kepuasan. Institusi dan pengalaman membantu menentukan apa yang diyakini orang sebagai hal-hal yang menyenangkan dan menyakitkan.

Analisis ekonomi kelembagaan masa pandemi COVID-19 dilakukan untuk menganalisis bagaimana perilaku ekonomi masyarakat masa pandemi COVID-19 dikaitkan dengan ilmu sosial yang lain.

5.2 Kondisi Indonesia Pascapemilihan Umum 2019 (Dua Tahun Sebelum Pandemi)

“**Pemikiran Kritis Kaum Milineal**” “*Cours camarade, le vieux monde est derrière toi*”. Salah satu slogan yang saya baca di dokumentasi foto saat revolusi Prancis 1968. Poster dengan makna serupa yang saya temui ketika aksi September 2019 di Indonesia.

Stigma Terpatahkan

Banyak Aktivist generasi X dan Y selalu pesimis dengan kepekaan sosial Generasi Z atau generasi Milineal. Pada umumnya mereka masih romantis dengan pergerakan sosial yang mereka lakukan

seperti peristiwa Malari dan Reformasi 1998. Mereka lupa bahwa masing-masing generasi akan membuat sejarahnya sendiri. Entah karena faktor usia yang melemahkan kemampuan kognitif mereka dalam bernalar atau mereka yang dulunya progresif berubah menjadi konservatif. Tapi saya pribadi sebelum muncul aksi September 2019, saya selalu percaya para generasi milineal ini akan menemukan momentum untuk menjawab semua keraguan generasi sebelumnya. Ada beberapa analisis kenapa saya punya keyakinan itu. *Pertama*, selama saya intens berdiskusi dengan mereka baik itu tentang obrolan santai atau diskusi serius tentang keilmuan, mereka sebenarnya kritis dan mampu berdialektika dengan caranya sendiri.

Kedua, belum ada isu yang mampu membuat milineal tertarik secara komunal di tingkatan komunitasnya. Kalaupun tertarik mereka hanya membicarakan di lingkungan komunitasnya. Misal, ketika ada persoalan bencana, kemiskinan, dan isu ketidakberdayaan secara materi lainnya maka dengan gerakan kesadaran altruisme mereka hadir membantu tanpa mengeluh dengan ketidakhadiran negara pada persolan seperti ini. Harus diakui sifat *altruism* dan *philantrophy* para milineal sangat tinggi. Mereka rela mengorbankan sebagian uang jajan dan ngopinya untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Kesadaran logis dan kedermawanan individu seperti ini sebenarnya sudah dibahas oleh Adam Smith tiga abad sebelum para milineal ini lahir.

Ketiga, pola interaksi penyamaan *interest* kaum milineal tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Mereka memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dan bersenang-senang. Pola ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh aktivis 90-an. *Keempat*, kondisi lingkungan sosial membawa mereka menjadi manusia rasional baik dalam padangan Durkheim

maupun Smith, bahkan Schumpeter. Basis kegiatan dan interaksi sosial para milenial ini adalah individu dalam artian logis dan rasional, bukan individu dalam artian sempit pragmatisme.

Kelima, kecenderungan literasi milenial yang lebih menyukai infografis yang dianggap lebih akurat dan instan untuk dimengerti daripada tulisan esai yang berbelit penuh dengan kutipan teori serta artikel juga telah merubah pola pergerakan milenial. Sedangkan Bagi aktivis 90 dan awal 2000 rasanya tak pantas menjadi aktivis kalau belum membaca esai dan buku perlawanan yang tebal dan penuh teori. Dari hal ini saja sudah bisa saya tebak seperti apa pergerakan sosial yang akan terjadi ke depan.

Kesadaran dan Kebebasan Individu

Dalam sebuah artikel tentang liberalisme Prancis yang saya baca ada kutipan, “*Il est interdit d’interdire*” yang artinya “dilarang melarang”. Kaum milenial memang mempunyai kesan apatis dan cuek dengan lingkungan sekitar, itu kalau kita hanya melihat kulitnya saja, padahal mereka tidak seperti itu. Kita kaum generasi X dan Y tidak pernah sadar bahwa para milenial ini ke mana-mana selalu membawa ilmu dan jawaban atas semua pertanyaan yang mereka sendiri pun tidak bisa menebak. Senjata utama mereka ada pada ponsel pintar mereka. Stok jawaban atas segala persoalan yang sifatnya tekstual sudah mereka genggam. Tinggal mereka berselancar di *Google* maka akan terjawab semua pertanyaan tekstual yang kita berikan.

Maka itu, salah besar ketika kita mengatakan “anak sekarang kok pintar-pintar ya”, padahal biasa saja, kita saja yang tidak mampu mengimbangi eksplorasi belajar mereka. Harus diakui juga pola pikir milenial sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh sirkel pergaulan mereka di media sosial, seperti *Instagram* dan *Twitter*. Kenapa

saya tidak menyebut *Facebook*? Ini karena milineal memiliki filter kesadaran individu untuk memilih jenis media sosial yang kompatibel dengan *lifestyle* mereka. *Facebook* sendiri mulai *ngetrend* di Indonesia 2005 setelah mampu mengalahkan *Friendster* di mana pendidikan para milineal ini mungkin masih di bangku SD dan SMP. Meskipun, masih ada milineal yang aktif di *Facebook*, jelas sangat beda pola pergaulan di FB, IG, dan *Twitter*.

Dalam media sosial *Facebook* ada kecenderungan topik yang dibicarakan sejak 2013, khusus penggunaanya di Indonesia adalah terkait persoalan agama, moral, dan politik yang pada intinya cenderung serius. Maklum, penggunaanya rata-rata di atas usia 30 tahun ke atas, usia yang mana puber medsosnya waktu lagi *trending* FB. Bahasan di FB yang cenderung serius berkaitan dengan moral, etika, dan agama politik mengarah pada jenis-jenis pelarangan beberapa kegiatan individu yang semestinya tidak diumbar ke publik, apalagi sampai diatur oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan sirkel milineal. Jadi tidak heran milineal lebih tertarik dengan IG yang kontennya lebih santai, *having fun*, dan suka-suka. Untuk milineal yang lebih *easy going*, mereka juga memilih hidup di media sosial *Twitter*. Percakapan di *Twitter* sangat bebas dan santai tapi mereka bisa mengobrol serius.

Di *Twitter* mereka juga lebih bebas berekspresi, bahkan sampai urusan privat (agama, sex, pendidikan, keluarga, atau asmara) karena di sana mereka tidak akan didamprat komentar para polisi moral seperti yang ada di FB. Ekspresi mereka sebagai seorang individu yang utuh seperti menemukan tempatnya. Konsep “dilarang melarang” menemukan ekosistemnya yang cocok serta kompatibel dengan kebutuhan individu milineal. Tanpa disadari milineal memang memiliki naluri liberalisme sejak dini sebagai seorang individu rasional. Hanya saja selama ini stigma buruk liberalisme selalu

diembuskan oleh kaum tua konservatif tanpa memberikan ruang bagi milineal untuk membuktikan kebenarannya. Karena memang sebelum aksi September 2019, para milineal belum memiliki ruang pembuktian dalam momentum yang tepat.

Jangan Usik Kebebasan Milineal

Syahdan, kontroversi pecah mulai dari pengesahan RUU KPK sampai Revisi KUHP. Semua orang terbelalak melihat gelombang aksi mahasiswa pada September 2019. Kerumunan jumlah mereka seperti ingin membentak lantang, “Wahai aktivis senior, lihatlah ini kami juga bisa aksi besar seperti kalian dulu”. Ada beberapa yang menarik untuk saya potret dalam tulisan ini. *Pertama*, para milineal ini rela berpanas ria ikut aksi demo karena isunya soal kebebasan individu yang akan dikekang oleh undang-undang. Alangkah lucunya yang membuat Revisi KUHP orang-orang senior yang sudah tidak lagi kompatibel lagi dengan model dan pola interkasi para milineal. *Kedua*, muncul banyak poster aksi yang lucu dan sifatnya protes terhadap pengekangan individu termasuk sex di dalamnya. Artinya kesadaran logis dan rasional para milineal sangat tinggi.

Mereka tidak mau urusan privat (seperti sex) diatur dan dikekang oleh negara. Mereka sadar konsekuensi yang akan dibebankan oleh undang-undang terhadap privasi mereka. Mirip sekali dengan munculnya revolusi Prancis 1968. Kita mungkin kaget dengan poster aksi yang sepertinya tidak senonoh itu tapi itulah kebebasan individu yang memang harus diperjuangkan. Pascaaksi 212 negeri ini seolah digiring ke arah konservatif di mana urusan privasi individu harus terstandarisasi oleh aturan dan norma tertentu. Para milineal yang turun aksi seolah membalikkan semua anggapan bahwa urusan privasi manusia Indonesia berhak diatur oleh segelintir golongan dan negara.

Mereka sebagian *silent majority* yang sudah mewakili rasan-rasan keresahan masyarakat Indonesia yang tidak mau kehidupan pribadinya diatur oleh otoritas. Mereka keluar dari dunia maya bergerak serempak menyuarakan kebebasan yang mereka idamkan. Mereka bukan kaum anarkis yang hanya bisa berutopia ria dengan idenya. Jika sebelumnya sifat altruisme dan *philantrophy* milineal sudah tidak diragukan lagi maka sekarang kita jangan pernah meragukan keberanian para milineal dalam melakukan aksi perlawanan demi kebebasan individu.

Kebijakan Publik untuk Milineal

Bonus demografi tidak hanya akan membawa konsekuensi bagi pasar tenaga kerja tapi juga bagi produksi kebijakan publik. Permasalahannya yang muncul adalah para produsen kebijakan publik baik di tingkatan daerah sampai pusat harus peka pada kebutuhan masyarakat milineal. Masing-masing daerah pasti memiliki struktur usia penduduk yang berbeda. Yang menjadi fokus dalam tulisan ini ketika struktur usia di suatu daerah tersebut didominasi oleh penduduk di bawah usia 50 tahun atau mungkin, bahkan usia 18-40 tahun lebih banyak dibandingkan dengan 41-50 tahun. Artinya, ini merupakan struktur penduduk yang kecenderungannya milineal dan platform media sosial yang digunakan mayoritas *Instagram* dan *Twitter*. Sehingga, dibutuhkan kebijakan publik yang memang berhubungan dengan para milineal tanpa mengusik urusan privasi mereka.

Jika kepala daerah memahami fenomena ini tentu ini menjadi bonus tambahan untuk meningkatkan citra diri atas kinerja yang sudah dilakukan. Sebab, apa pun yang dilakukan kepala daerah entah itu baik atau buruk akan dibahas oleh para milineal di media sosial. Alangkah beruntungnya jika kebijakan publik yang

diproduksi kepala daerah ini sangat disukai dan mendukung kegiatan milineal. Sudah banyak contoh kebijakan publik yang mampu di-*blow up* dengan baik oleh penduduknya yang milineal sehingga kepala daerahnya menjadi *trending* di media sosial.

Salah satu contoh misalnya Bu Risma, Walikota Surabaya yang banyak membuat taman kota dan fasilitas pendukung lain untuk publik. Bisa dilihat *traffic* perbincangan media sosial tentang kebersihan, taman, dan fasilitas di Surabaya hampir semua direspons positif oleh milineal Surabaya. Hal ini dikarenakan yang disentuh adalah hal yang memang bersifat dan bebas kepentingan publik masyarakat urban, bukan soal pengaturan privasi milineal. Apalagi yang dibangun baik taman atau fasilitas lainnya sangat *instagramable*. Ini menjadi santapan empuk milineal untuk eksis dan memamerkan keindahan kotanya tanpa rasa malu. Dalam posisi seperti ini tidak ada *zero sum game* dari sebuah kebijakan publik. Kalaupun ada riak kontroversi itu wajar saja karena publik ranahnya luas, tidak hanya mewakili satu golongan semata.

Tentu semua kepala daerah menginginkan apa yang sudah dikerjakan di wilayah kekuasaannya mendapat apresiasi positif. Untuk itu, saya di sini menyarankan dalam penyusunan kebijakan publik harus berdasar kebutuhan bukan pada keinginan dan agenda kelompok tertentu. Menggali ide kebijakan secara partisipatif dengan melibatkan peran serta tokoh milineal mutlak harus dilakukan. Sinergikan antara persoalan masyarakat dengan rumusan jalan keluarnya. Milineal yang progresif selalu memiliki jalan keluar yang tidak bisa ditebak oleh kaum tua konservatif. Maka berikanlah mereka kesempatan dan arena untuk ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan publik.

5.3. Perekonomian Indonesia 2020 (Setahun sebelum Pandemi)

Ketidakpastian berlanjut, tentunya ketidaknyamanan dalam perekonomian pasti terjadi. Tahun 2019 menyisakan beberapa hari lagi, seperti biasa banyak lembaga merilis *outlook*-nya terhadap perekonomian dunia secara makro. Dalam tulisan ini ada beberapa hal yang akan saya bahas terkait *outlook* ekonomi Indonesia pada 2020.

Pertama, pertumbuhan ekonomi. Ini sudah menjadi menu pembuka wajib sebelum memulai telaah angka indikator ekonomi makro lainnya. *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada November 2019, merilis *outlook* untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 sebesar 5%. Angka ini relatif lebih rendah daripada rilis *outlook World Bank* 5,1% dan *Asian Development Bank* (ADB) yang memproyeksikan di angka 5,2 persen. Sedangkan proyeksi dari Bank Indonesia (BI) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mencapai 5,1-5,5 persen dengan titik tengah 5,3 persen sebagaimana tertuang dalam asumsi makro APBN 2020.

Jika kita mengikuti perkembangan angka pertumbuhan ekonomi memang target dalam APBN sering meleset meskipun hanya nol di belakang koma (*basis point*). Prediksi saya pertumbuhan ekonomi 2020 memang akan berkisar di angka 5,2%-5,3%. Rasanya sangat berat untuk menembus pertumbuhan di angka 5,5% dengan kondisi goncangan eksternal yang ada sekarang. Tentu pemerintah atau BI sudah menguji angka yang mereka rilis dengan berbagai macam skenario *stress test*. Untuk angka pertumbuhan di bawah angka 5% pun seperti yang dirilis JP. Morgan rasanya agak berat juga. Perekonomian Indonesia memiliki ciri khas yang bisa melejit pada bulan tertentu.

Saya yakin, lembaga prediktor tersebut acuannya hanya bulan masehi. Padahal, di Indonesia juga berlaku kalender Hijriyah.

Biasanya memang sebelum Ramadan perekonomian domestik agak stagnan mengikuti tren tahun sebelumnya. Tapi ketika Ramadan perekonomian domestik pasti menggeliat. Denyut perekonomian berdetak relatif lebih kencang daripada sebelumnya. Efek kejut seperti ini yang tidak dimiliki oleh beberapa negara maju yang tergabung dalam G20. Tapi harus dibarengi dengan prinsip prudential yang ketat. Banyaknya jumlah uang beredar untuk konsumsi bisa memicu adanya inflasi.

Akan tetapi, kalau melihat dua tahun belakangan inflasi pada Ramadan mampu dikendalikan dengan baik. Selain terbantu Ramadan, perekonomian Indonesia akan terdongkrak juga dengan adanya skema bantuan tunai dari pemerintah dan suku bunga yang relatif rendah sehingga diharapkan memicu investasi. Kita tidak usah khawatir dengan kemampuan BI dalam mengelola inflasi. Ini modal bagus bagi perekonomian Indonesia karena memang sudah teruji. Di tengah hantaman badai resesi global bauran kebijakan moneter dan fiskal berjalan dengan baik meskipun harus dengan kebijakan yang terkadang memberatkan pelaku ekonomi. Adanya keberlanjutan proyek infrastruktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja juga dapat membantu menopang perekonomian nasional.

Kedua, investasi yang diprediksi akan meningkat mengingat tahun “panas” politik sudah selesai. Pihak yang kalah pun dalam kontestasi Pemilihan Capres juga sudah dirangkul. Kebisingan akibat pertentangan politik akan berkurang. Ekosistem yang aman dan nyaman sangat disukai oleh para investor. Selain itu adanya proyek infrastruktur yang terus digenjot dan sebagian yang sudah terealisasi akan sangat menguntungkan bagi iklim investasi. Prediksi untuk angka investasi adalah mengalami kenaikan hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi, yakni 5,2%-5,4%.

Pemerintah dan swasta juga harus hati-hati dalam kebijakan

pengupahan agar tidak ada lagi pabrik hengkang dari Indonesia. Terkait kebijakan pengupahan buruh, wilayah ring satu Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto) menjadi klaster yang paling kritis di luar ring satu Jabodetabek. Eksodus beberapa perusahaan yang ada di ring satu Jatim ke Jawa Tengah patut menjadi *warning*. Beruntung perpindahan industri yang terjadi masih dalam koridor wilayah regional. Pemerintah melalui BPKM juga harus mampu menarik investor luar negeri baik yang akan mendirikan industri baru maupun relokasi industri dari luar negeri ke Indonesia. Iklim perekonomian yang kondusif sudah ada beberapa hambatan di bidang pengupahan, perizinan, dan isu radikalisme di domestik harus segera dituntaskan. Isu ketidaknyamanan tersebut jangan terus digoreng seolah instrumen negara tidak mampu mengatasinya. Investor butuh kenyamanan bukan isu menakutkan.

Ketiga, kondisi eksternal. Selama Donald Trump masih menjadi Presiden Amerika Serikat maka *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity* (VUCA) era akan terus berlanjut. *Trade war* USA versus Tiongkok dan sekarang merembet dengan halus menjadi Tiongkok versus Uni Eropa bagi sebagian pihak akan memperparah kondisi perekonomian global yang sedang guncang. Namun bagi sebagian pengusaha *trade war* dianggap peluang pasar baru bagi komoditas ekspor mereka.

Kondisi perekonomian global yang tidak nyaman ini akan menekan posisi perekonomian nasional dari sisi perdagangan barang dan keuangan internasional. Pada tiga kuartal 2019, ekspor Indonesia tercatat mengalami kontraksi hingga -8,1 persen (yoy) tentu bukan berita yang bagus. China menjadi mitra utama tujuan ekspor-impor Indonesia dan pusat jaringan produksi bagi ASEAN. Tentu *trade war* akan berdampak bagi perdagangan Indonesia dengan China. Sekitar 40% komoditas ekspor Indonesia ke China

adalah kelapa sawit dan batu bara. Pelemahan produksi di domestik China akan memberikan dampak pada volume transaksi ekspor sawit dan batu bara.

Saat ini pemerintah kebingungan mencari pasar alternatif untuk tujuan ekspor sawit karena Uni Eropa juga menjalankan kebijakan diskriminatif bagi kelapa sawit dari Indonesia. Dampaknya akan langsung terasa pada wilayah penghasil sawit dan batu bara seperti Sumatra dan Kalimantan. Daya beli di kedua provinsi tersebut akan terpukul dan akan memberikan dampak bagi perekonomian nasional. Pasar alternatif terbesar untuk tujuan ekspor kelapa sawit sebenarnya ada di Rusia. Ini harus segera diupayakan mengingat Rusia tidak serewel Uni Eropa dalam urusan kelapa sawit. Jangan sampai Investasi dan peluang ekonomi Rusia bagi ASEAN porsi terbesarnya hanya dinikmati oleh Vietnam.

Di tengah ketidakpastian global saya masih percaya para pelaku bisnis dari sisi produksi akan selalu mencari alternatif sumber energi dan bahan baku murah bagi keberlanjutan produksinya. Pada kondisi ini kelapa sawit dan batu bara tetap akan menjadi komoditas utama ekspor Indonesia. Ekspor akan merangkak naik meskipun tidak tinggi. Berita bagus lainnya China membalas kebijakan Trum terkait bea masuk barang China ke Amerika dengan tarif impor minyak kedelai dari AS oleh China. Kita tahu China akan mendorong permintaan produk substitusinya, yakni *Crude Palm Oil* (CPO). Sedikit angin segar bagi neraca ekspor Indonesia.

Dari sisi keuangan *capital outflow* masih harus diwaspadai karena bukan tidak mungkin Amerika akan menaikkan suku bunga acuannya. Selain itu mengutip dari tulisan Chatib Basri di harian Kompas (7 juni 2019), kita juga wajib waspada pada kemungkinan terburuk yang terjadi, yakni China akan menjual obligasi US Treasury yang dimilikinya sebagai balasan terhadap kebijakan Trump.

Nilainya luar biasa besar, yakni lebih dari 1 Triliun US Dollar. Skema ini menyeramkan bagi Amerika dan akan menimbulkan tsunami besar bagi keuangan internasional. Namun sepertinya tidak akan dilakukan China. Tapi sepertinya hanya Xi Jinping dan Tuhan yang tahu.

Dilema Daya Beli

Kebijakan ekonomi pada 2020 harus berupaya menjaga daya beli masyarakat. *Agregate demand* menjadi motor perekonomian nasional yang harus selalu digenjot. Kenaikan upah minimum bagi buruh menjadi salah satu *trigger* peningkatan daya beli. Tapi di sisi lain memberatkan pengusaha. Bantuan tunai pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan menjadi instrumen untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Akan tetapi, kebijakan pemerintah justru ada yang memukul sehingga melemahkan daya beli seperti penghapusan subsidi listrik golongan 900 VA, pemangkasan subsidi solar dari Rp2.000 per liter menjadi Rp1.000 per liter, pemangkasan subsidi LPG 3 kg, kenaikan iuran BPJS, serta kenaikan cukai rokok. Resiko penurunan daya beli bagi masyarakat berpenghasilan tetap sudah di depan mata. Gejala dari melemahnya konsumsi masyarakat pun sudah tampak dari indeks penjualan riil (IPR) yang dirilis oleh Bank Indonesia, pertumbuhannya per kuartal III/2019 hanya sebesar 1,4 persen. Pelemahan daya beli sepertinya tidak akan berlangsung selama periode satu tahun penuh di 2020. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan perubahan seperti ini. Penyesuaian akan terjadi dengan cepat sehingga saya masih optimis 2020 daya beli masyarakat masih bisa terjaga dengan baik.

Selain itu, pemerintah juga harus lebih *friendly* dalam merumuskan dan menentukan kebijakan, khususnya jual beli yang ter-

jadi di *market place*. kebijakan pendataan wajib pajak bagi penjual di *market place* tentu bagus sebagai upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Akan tetapi, patut berhati-hati apabila sudah masuk dalam ranah lenganaan pajak bagi pelaku di (penjual) *market place*. Kondisi perdagangan ritel yang lesu tidak hanya disebabkan pelemahan daya beli kemungkinan juga terjadinya disrupsi pelaku ritel oleh pelaku di *market place*. Pengenaan pajak hanya akan memindahkan dan menambah beban bagi pelaku *market place*.

Jadi, dalam hal ini perlu pemilahan kategori *size* perdagangan penjual yang akan dikenakan pajak. Pemerintah terlalu masuk dalam pasar tentu tidak terlalu bagus. Biarkan dulu pelaku perdagangan di *market place* menemukan titik keseimbangannya. Fokus awal kebijakan pemerintah seharusnya pada perlindungan konsumen serta protokoler keamanan data pribadi konsumen. Selanjutnya, antisipasi dini terhadap munculnya potensi gelombang krisis keuangan dari ambruknya perusahaan *start up* yang berpredikat *unicorn*. Strategi “bakar uang” menjadi insentif bagi konsumen untuk terus bertransaksi yang dilakukan perusahaan *start up* ini memang beresiko besar. Mitigasi krisisnya harus ditentukan secepatnya. Kebijakan *sand box* harus reaktif karena perubahan terjadi secara cepat. Artinya, kondisi mikro ekonomi mutlak harus dijaga kenyamanannya. Pemerintah harus memahaminya persinya sejauh mana harus masuk dalam pasar.

Pelaku mikro sangat sensitif dengan perubahan kebijakan. Indonesia sekarang tidak bisa berharap *booming* harga komoditas di pasar internasional, seperti yang terjadi pada harga batu bara sebelum 2010. Maka dari itu, penguatan ekonomi di tingkatan mikro mutlak harus dilakukan. Harapan ekonomi tumbuh di tengah badai ketidakpastian pada 2020 masih ada meskipun harus merangkak tidak bisa berlari kencang.

5.4. Ekonomi Pariwisata, Sektor Rapuh yang Menjadi Idola Baru

Ketika saya diskusi tentang pengelolaan tempat wisata, seorang teman bertanya, “Mau menarik *tourist* atau *traveler*?” Ini sama saja, saya ditanya beda bahagia dan nikmat.

Selamat Tinggal Tiket Murah

Tahun 2019 sepertinya menjadi tahun yang menyakitkan bagi konsumen pesawat terbang. Harga tiket pesawat naik. Sebuah titik balik bagi konsumen penerbangan domestik. Mengingat pada periode 2000 hingga 2018 harga tiket pesawat masih sangat murah sebagai akibat persaingan antar maskapai jalur penerbangan domestik. Banyak analisis mencuat terkait naiknya tiket pesawat domestik ini, mulai dari indikasi praktik kartel maskapai penerbangan, naiknya biaya *leasing* pesawat karena sifatnya sewa, naiknya harga avtur (dikenakan sebesar 26% dari harga tiket), hingga naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi, kali ini saya tidak akan membahas penyebab pastinya apa. Dalam tulisan kali ini akan saya bahas tentang dampak sengkabut tiket pesawat ini pada sektor pariwisata.

Perlu diketahui bahwa dalam perkembangannya sekarang kenaikan harga tiket pesawat ternyata menyumbang terbentuknya inflasi nasional, di mana inflasi pada maret 2019 sebesar 0.11% dan kenaikan tiket pesawat berkontribusi 0.03% atas inflasi, bukan Maret tersebut. Dikutip dari CNBC, rata-rata kenaikan tiket pesawat tujuan domestik sudah di atas 10%. Kenaikan tertinggi ada pada jalur penerbangan domestik Singkawang Kalimantan Barat, yakni sebesar 27%. Dari sisi jumlah penumpang sepanjang kuartal III 2019, jumlah penumpang pesawat Garuda Indonesia anjlok hingga 20,6% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka yang tentunya membawa *multiplier effect* negatif bagi sektor yang

berkaitan dengan transportasi udara. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian serius adalah sektor pariwisata.

Rentan tapi Diandalkan

Sekitar empat tahun belakangan pariwisata seperti sedang menemukan momentumnya untuk menjadi idola baru dalam meningkatkan perekonomian nasional. Di tengah seretnya penerimaan negara dari pajak, pariwisata seperti menjadi katup lain penyelamat penerimaan negara dari devisa, meskipun kontribusinya belum dalam titik optimal. Data dari Kementerian Pariwisata, devisa yang disumbangkan dari sektor pariwisata Indonesia 2018 tembus US\$ 19,29 miliar atau hampir mencapai target US\$ 20 miliar yang dicanangkan Presiden Jokowi pada 2019. Devisa ini didapat dari kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 15,8 juta orang. Maka tidak salah jika investasi di sektor pariwisata akan digenjet terus. Pemerintah telah menambahkan anggaran Rp6,35 triliun untuk empat destinasi super prioritas dengan rincian; Danau Toba Rp2,2 triliun, Borobudur Rp2,1 triliun, Labuan Bajo Rp300 miliar, dan Mandalika Rp1,9 triliun. Jika semua berjalan mulus bukan tidak mungkin Sektor pariwisata akan mengalahkan kontribusi *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai komoditas andalan.

Kondisi geografis yang mendukung menjadikan Indonesia sebagai hamparan destinasi wisata alam yang terbesar di dunia. Maka tak ayal dari tingkatan desa banyak destinasi wisata menjamur dengan berbagai konsep dan tema. Persaingan pasar sempurna antar tempat wisata buatan muncul. Tentu seperti biasa akan ada buah manis dan buah pahit dari munculnya persaingan destinasi wisata yang baru dibangun ini. Akan ada tempat wisata yang ramai dan tempat wisata yang sepi. Dari sinilah mulai muncul desa sebagai pemenang desa wisata dan desa yang kalah.

Pada tingkatan nasional geliat wisata seperti hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur utilitas dan akses pendukung wisata, dan pembangunan destinasi 10 Bali baru. Secara teoritis di atas kertas luar biasa memang visi untuk membangkitkan pariwisata nasional. Selain itu, sektor pariwisata erat kaitannya dengan sektor penginapan (hotel) dan pengembangan UMKM berbasis pariwisata di masing-masing wilayah perencanaan. Tapi di sisi lain, hambatan ganas bagi sektor pariwisata mulai muncul. Kenaikan harga tiket pesawat bisa menjadi monster mematikan bagi sektor pariwisata yang sedang dalam *trend* positif.

Katup Penyelamat

Jika pariwisata akan dijadikan sektor unggulan yang akan menggantikan CPO maka langkah antisipasi akibat kegagalan pasar di sektor pariwisata harus segera diantisipasi. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan kenapa langkah antisipatif ini harus segera dibuat. *Pertama*, sengkarut mahalannya harga tiket pesawat domestik harus segera diselesaikan. Selain faktor yang ditulis di atas ada faktor regulasi yang harus dikaji ulang secepatnya, yakni Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat. Dalam kompetisi operator penerbangan domestik seharusnya harga menjadi instrumen bagi mereka untuk menarik animo penumpang sebanyak mungkin. Namun yang terjadi tidak demikian, munculnya TBA tiket pesawat tidak membuat harga menjadi instrumen utamanya.

Respons Maskapai domestik terhadap TBA yang diatur melalui Keputusan Menhub No. 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri belum berdampak pada penurunan harga tiket secara signifikan. Hal ini terjadi karena para maskapai semakin memiliki keleluasaan menentukan harga (*Price maker*) meskipun

TBA sudah diturunkan. Penumpang tidak punya pilihan lain sebagai alternatif pengganti pesawat, apalagi penumpang dengan tujuan luar pulau Jawa yang tidak terkoneksi oleh jalur kereta api dan jalan tol. Suka atau tidak penumpang terpaksa membeli tiket mahal karena disadari atau tidak TBA memang menempatkan penumpang pada posisi *price taker*. Tugas untuk menyelesaikan persoalan ini ada pada Kementerian Perhubungan untuk segera mencari solusi kebijakan di luar TBA.

Solusi untuk menambah jalur penerbangan domestik bagi maskapai asing tidak akan menjawab persoalan ini selama TBA tidak dirumuskan dengan cermat. Jika menggunakan logika dalam pasar persaingan sempurna di mana harga kesimbangan ditentukan oleh *supply* dan *demand* maka patut dipertanyakan pada Pak Menteri perhubungan, apakah masih perlu TBA? Seharusnya Presiden Jokowi memberikan *deadline* untuk Menteri perhubungan menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan masyarakat sebagai calon penumpang terus menerus dalam posisi pasrah menerima kenaikan tiket pesawat.

Kedua, jika wisman memang mau dijadikan sasaran utama wisata karena alasan *spending money*-nya lebih besar daripada wisatawan domestik maka pembangunan konsep wisata nasional harus betul-betul sesuai dengan kearifan lokal yang ada, di mana kearifan lokal yang ditawarkan tidak bisa ditemui oleh wisman di negara asalnya. *Ketiga*, asuransi bagi UMKM yang sektor usahanya berkaitan langsung dengan tempat wisata. Pemberian asuransi gagal pasar bagi pelaku UMKM bisa menjadi insentif untuk mereka menjual banyak *output* dengan kualitas tinggi juga. Tentu ini harus dimulai dari pendataan yang akurat dan terukur terkait jenis usaha UMKM yang terlibat sekaligus harus diidentifikasi data pelaku UMKM tersebut. *Big data* sekaligus protokoler perlindungan data di bidang

UMKM bisa dimulai dari sini. *Ketiga*, menjamurnya wisata buatan berbasis usaha desa harus segera diidentifikasi. Hal ini penting karena mulai muncul *trend* kelurahan desa untuk berlomba-lomba membuat destinasi wisata baru di desanya.

Resiko muncul ketika destinasi yang dibangun tersebut tidak memperoleh kunjungan yang besar. Gejala ini mulai sangat terlihat, apalagi konsep wisata buatan yang dibangun oleh desa bertemakan *hypie* yang hanya mengejar *Instagramable*, tapi tidak melibatkan unsur *intangible* kearifan lokal. Wisata seperti ini biasanya hanya akan menjadi *trend* sesaat. Dampaknya bisa berakibat pada kesehatan keuangan yang bersumber dari dana desa. Kementerian Desa dan PDT harus segera melakukan kajian dan survei terkait potensi unggulan desa se-Indonesia sehingga desa bisa menentukan sektor unggulan apa yang harus dikembangkan.

Sekali lagi *big data* tentang desa sangat diperlukan. Walaupun desa mempunyai potensi wisata tetap harus difasilitasi keberlanjutan sektor pariwisata tersebut. Kolaborasi pemerintah desa dan swasta harus dibangun. Perkembangan dunia bisnis sekarang mewajibkan penguasaan teknologi. Desa dengan keterbatasannya pasti akan butuh teknologi canggih sebagai infrastruktur pendukung maupun sebagai faktor produksi yang harganya tidak murah. Di sinilah peran kolaborasi swasta dibutuhkan. Adanya teknologi akan membuat desa wisata tidak hanya dikenal oleh wisatawan lokal domestik semata, tapi juga akan menjadi destinasi bagi wisatawan mancanegara.

Potensi sektor pariwisata bagi perekonomian nasional memang tidak terbantahkan. Akan tetapi, jangan hanya dilihat potensi penerimaannya semata, potensi kegagalannya pun cukup besar. Mengingat sektor pariwisata bergantung juga pada hal nonekonomi selain yang sudah dijabarkan di atas. Indonesia pernah punya

pengalaman buruk terkait ambruknya sektor wisata. Tragedi Bom Bali I disusul kemudian Bom Bali II memberikan *multiplier effect* yang negatif bagi seluruh pelaku ekonomi di sektor pariwisata, bahkan dampaknya meluas tidak hanya dirasakan pelaku wisata di Bali, tetapi juga bagi pelaku UMKM kerajinan tangan di Jawa Timur yang produknya dijual ke Bali langsung merosot tajam.

Selain isu teroris, sektor pariwisata juga rentan dengan kejadian bencana alam apalagi Indonesia masuk dalam *kategori ring of fire* serta rentan gempa dan tsunami. Sensitivitas sektor pariwisata pada beberapa isu ekonomi dan nonekonomi menjadikan sektor ini memang harus mendapatkan perhatian khusus. Penanganan resiko gagal pasar sektor pariwisata seharusnya menjadi insentif baik bagi wisatawan maupun seluruh pelaku ekonomi di sektor pariwisata. Jika beban berat yang ada di atas kaca bisa disingkirkan maka selanjutnya biarkan para pelaku pariwisata menari dengan bebas dan indah di atas kaca yang sudah disiapkan tanpa khawatir kaca tersebut bisa pecah kapan saja.

5.5. Pilihan Sulit Ekonomi atau Kesehatan (Masa Pandemi)

Praktik keseharian aktivitas ekonomi tidak lepas dari namanya *opportunity cost*, sebuah pilihan dengan keterbatasan tapi harus bisa memaksimalkan pilihan tersebut. Konsep ilmu ekonomi selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan bagaimana caranya keterbatasan tersebut bisa didistribusikan secara maksimal dengan biaya yang paling efisien. Demikian pula dengan pilihan kebijakan ekonomi yang harus diambil oleh pemerintah yang akan selalu diwarnai oleh berbagai macam pilihan yang akan diambil dengan sumber dana (dalam hal ini APBN) yang terbatas. Pada kondisi perekonomian normal mungkin sebuah kebijakan ekonomi akan dengan mudah diputuskan, bahkan dalam kondisi terjadi

goncangan (*shock*) yang diakibatkan fluktuasi variabel ekonomi akan dengan cepat kebijakan konfersiklus akan diambil.

Pada 2016 turbulensi perekonomian dunia mulai terasa saat Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, kondisi VUCA akibat kebijakan perdagangan yang diterapkan Trump. Padahal, kondisi perekonomian dunia belum sempat pulih akibat krisis Uni Eropa dan menurunnya harga komoditas dunia. Melemahnya kondisi perekonomian dunia diperparah dengan ketidakkonsistenan Amerika Serikat pada pasar bebas dan globalisasi yang selalu didengungkannya.

Semboyan kebijakan perdagangan *Trump* “*American First*” berbuah perang dagang dua raksasa ekonomi dunia Amerika dan China. Pengenaan tarif impor bagi barang impor yang masuk ke Amerika sangat mengguncang perekonomian dunia, tak terkecuali perekonomian Indonesia. Kondisi eksternal yang terguncang akibat perang dagang Amerika dan China masih bisa direspons dengan kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun perekonomian menurun ditandai dengan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 sebesar 5,02% turun tipis dibandingkan 2018 dengan pertumbuhan ekonomi 5,17%.

Penurunan kinerja ekonomi tidak hanya disebabkan oleh perang dagang China dengan Amerika, tetapi ada penyebab yang tidak terlihat yang memakan banyak pengusaha kalah dalam persaingan bisnis. Musuh tidak terlihat tersebut kemudian dikenal dengan disrupsi ekonomi sebagai salah satu buah dari dimulainya era revolusi industri 4.0. Produksi kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah pun merespons terjadinya disrupsi ekonomi. Pada titik ini kebijakan masih mampu merespons goncangan yang terjadi akibat disrupsi meskipun respons sedikit telat dan gagap.

Memasuki awal 2020 perekonomian berjalan normal hingga

masuk pada Maret kasus pasien pertama positif COVID-19 terdeteksi di Indonesia. Kondisi mulai berubah hingga WHO menetapkan kondisi pandemi. Kondisi perekonomian mulai sangat terganggu. Respons masyarakat pun beragam, mulai dari respons yang panik hingga respons yang biasa saja. Respons panik mulai bisa dirasakan ketika masker dan *hand sanitiser* langka di pasar karena diborong oleh pembeli dan spekulasi. Demi mencegah penularan pandemi maka kebijakan *Work From Home* dan belajar dari rumah mulai diberlakukan. Sungguh kondisi yang sangat tidak diharapkan oleh siapa pun, apalagi bulan Puasa dan hari raya semakin dekat.

Tidak perlu menunggu waktu lama, memasuki April penurunan daya beli masyarakat mulai terjadi. Respons dunia usaha pun beragam, mulai dari pemotongan gaji, penundaan pembayaran gaji, dicutikan sementara, hingga yang terburuk gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan pabrik yang produksinya terganggu akibat pandemi. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada 2,8 juta pekerja terkena dampak ekonomi akibat terhentinya aktivitas produksi (*katadata.com*, 2020).

Kondisi makro ekonomi pada kuartal pertama 2020 langsung mengalami kontraksi dibandingkan dengan periode yang sama. Pada 2019 pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020 turun menjadi 3%. Dari sisi penerimaan negara melalui pajak pada kuartal pertama 2020 juga mengalami penurunan sebesar 2,47% dibandingkan pada periode yang sama pada 2019 atau hanya menghasilkan Rp241,61 triliun. Rapor merah juga menimpa sektor pariwisata, pada Maret 2020 kunjungan wisatawan mancanegara langsung turun drastis ke angka -67,4% dan tingkat hunian hotel pada bulan yang sama turun ke -2,30 poin. Sungguh kondisi yang tidak terduga sebelumnya dan terjadi begitu cepat.

Alarm akan munculnya gelombang resesi dunia mulai mecuat. Tidak satupun negara di dunia ini siap dengan kondisi resesi ekonomi yang diakibatkan pandemi karena dunia belum pernah menghadapi pandemi yang begitu hebat seperti COVID-19. Pemerintah mulai merespons kebijakan ekonomi dengan cara konter siklis pada sisi fiskal. Hal paling kentara bisa dilihat dari postur pengeluaran masing-masing negara dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Negara tetangga Singapura mengeluarkan *safety net* dan stimulus fiskal sebesar 12% dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB), Jepang 20% dari PDB, Jerman, 10% dari PDB, dan Indonesia sekitar 3% dari total PDB. Khusus untuk Indonesia rincian pengeluarannya sebagai berikut: Rp75 triliun untuk kesehatan, Rp110 triliun, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi moneter, berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia sampai dengan minggu keempat April 2020, menunjukkan bahwa harga-harga di pasar terkendali dan rendah. Inflasi April 2020 diperkirakan sekitar 0,18% (mtm) atau 2,78% (yoy). Prakiraan inflasi April 2020 tersebut lebih rendah dari Maret 2020 sebesar 2,96% (yoy) dan Februari 2020 sebesar 2,98% (yoy). Hal ini mengonfirmasi bahwa sampai dengan akhir 2020, inflasi akan terkendali dan rendah di kisaran sasaran $3 \pm 1\%$. Pada periode ini inflasi masih tergolong rendah dan terkendali.

Nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat mengarah ke Rp15.000 pada akhir tahun. Pada Selasa (28/4), rupiah ditutup pada level Rp15.380, melemah Rp70 dari hari sebelumnya Rp15.310 (27/4). Pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh faktor teknikal, yaitu kebutuhan valuta asing dari korporasi yang relatif

tinggi sesuai pola historikalnya serta langkah pemerintah di berbagai daerah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang oleh sejumlah pelaku pasar dipersepsikan akan berdampak menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, lembaga Fitch Rating memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 sekitar 2,8% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya, meskipun masih lebih tinggi dari perkiraan Bank Indonesia, yaitu sekitar 2,3% (yoy).

Bank Indonesia ikut merespons kondisi ini dengan melakukan keikustertaan BI dalam pembelian SBN di pasar perdana. Pada pelaksanaan lelang SBN (28/4), pemerintah mengindikasikan target lelang Rp20 triliun dengan target maksimal Rp40 triliun. Sesuai dengan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kemenkeu, pembelian SBN di pasar perdana oleh Bank Indonesia sebagai *noncompetitive bid* sebesar maksimal 25% dari target maksimal atau sekitar Rp10 triliun, namun agar Bank Indonesia mendahulukan pelaku pasar sehingga hanya melakukan *bid* sebesar Rp7,5 triliun. Jumlah yang dimenangkan dalam pelaksanaan lelang SBN dari *bid* sebesar Rp44,4 triliun adalah Rp16,6 triliun dengan rincian Rp2,3 triliun untuk Bank Indonesia, dan sisanya sekitar Rp14,3 triliun dimenangkan oleh pasar.

Sesuai dengan keputusan pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) April 2020 lalu, bentuk pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain berupa *quantitative easing*. Sampai dengan saat ini, *quantitative easing* yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sebesar Rp503,8 triliun, terdiri dari:

- a. Periode Januari – April 2020 sebesar Rp386 triliun yang bersumber dari pembelian SBN di pasar sekunder dari investor asing sebesar Rp166,2 triliun, *term repo* perbankan sebesar Rp137,1 triliun, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) ru-

piah di Januari dan April 2020 sebesar Rp53 triliun dan swap valuta asing sebesar Rp29,7 triliun.

- b. Periode Mei 2020 sebesar Rp117,8 triliun yang bersumber dari penurunan GWM rupiah sebesar Rp102 triliun serta tidak memperlakukan kewajiban tambahan Giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar Rp15,8 triliun.

Kebijakan *quantitative easing* akan dapat memberikan dampak yang efektif ke sektor riil dengan dukungan dari stimulus fiskal, antara lain melalui implementasi jaring pengaman sosial, insentif industri termasuk subsidi KUR dan program bantuan sosial lainnya serta dukungan restrukturisasi kredit. Implementasi kebijakan *Quantitative Easing* sebesar Rp503,8 triliun.

Kebijakan fiskal dan moneter sudah berjalan pada jalur yang tepat senada dan kompak melakukan kontersiklus untuk berupaya menahan laju kemerosotan ekonomi akibat penurunan daya beli. Akan tetapi, pandemi merupakan variabel lain di luar ekonomi sehingga kebijakan penyerta seperti kebijakan terkait kesehatan harus mendukung kebijakan kontersiklus. Pemilihan kebijakan di bidang kesehatan mulai menimbulkan kegaduhan publik, pro dan kontra pembatasan atau karantina wilayah bahkan usulan *lock down* mencuat. Beberapa negara yang juga terdampak COVID-19 menerapkan berbagai kebijakan kesehatan untuk menekan jumlah korban akibat pandemi. Silang pendapat dan perang pemikiran menjadi dialektika keseharian di media sosial dan webinar.

Sangat menarik ketika negara yang terlebih dahulu berhasil mengatasi wabah pandemi adalah negara dengan pemimpin pemerintahannya adalah wanita. Ada beberapa negara yang dipimpin wanita dan sukses mengatasi pandemi gelombang pertama ini, di antaranya; Kanselor Jerman Angelina Merkel, bahkan Negara

Jerman merupakan negara pertama yang kembali memulai pertandingan Liga Jerman pada Juli, bahkan pada minggu pertama Oktober pertandingan Liga Jerman di Kota Dortmund sudah bisa disaksikan langsung di lapangan dengan jumlah penonton sebanyak 11ribu orang. Sungguh prestasi yang membanggakan mengingat beberapa negara masih berjuang keras menurunkan angka korban akibat koronavirus.

Negara berikutnya adalah Denmark. Perdana Menteri perempuan dari negara ini, Mette Frediksen, juga dikatakan sukses menekan laju jumlah korban. Pemimpin perempuan lain di kawasan Skandinavia adalah Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir dari Islandia. Itulah beberapa pemimpin perempuan dari kawasan Eropa yang berhasil menekan penyebaran virus dan menekan jumlah korban di negaranya masing-masing. Di negara New Zealand, Perdana menteri Jacinda Ardern menjadi buah bibir karena mampu dengan cepat melewati masa pandemi, bahkan pada Oktober 2020 New Zealand sudah menyatakan bebas dari COVID-19 gelombang kedua (*second wave*).

Dari kawasan Asia Timur muncul Presiden Taiwan, Tsai Ing-Wen yang mampu membawa Taiwan menjadi negara di Asia yang tangguh di tengah wabah pandemi dengan jumlah orang terpapar virus hanya 395 kasus. Tentu kesuksesan para pemimpin perempuan ini buah dari ketepatan, kecepatan dalam mengambil langkah kebijakan ekonomi dan kesehatan, serta dukungan dari warga yang disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Apabila ditelisik, negara-negara ini sudah menyiapkan datangnya gelombang pandemi COVID-19 sejak akhir Desember 2020 atau beberapa minggu setelah Wuhan di China mengumumkan kasus postif COVID-19 pertama. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Sejak awal Januari 2020 sampai Maret,

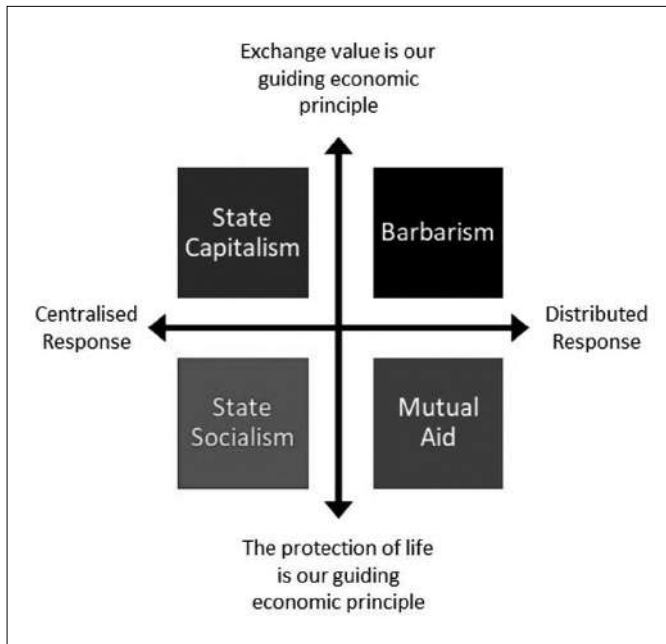
pemangku kebijakan masih dengan tenang dan seolah meremehkan kasus COVID-19. Berbagai argumen tidak penting dilontarkan oleh para menteri terkait wabah COVID-19 yang seharusnya memiliki daya analisis peramalan terkait kondisi ke depan. Kelengahan selama kurun waktu tiga bulan Januari-Maret berbuah kisah tragis yang akan memberi dampak terjadinya lonjakan secara eksponensial jumlah kasus positif COVID-19. Yang mana, pada Maret 2020 jumlah kasus positif pertama hanya tiga orang sampai Oktober (tujuh bulan berjalan) melonjak menjadi 300 ribu lebih kasus positif.

Munculnya pandemi tidak hanya mengubah kegiatan dan aktivitas manusia dalam keseharian. Pandemi menciptakan evolusi penggunaan teknologi yang dipercepat. Sebelum masa pandemi semua kegiatan dilakukan dengan tatap muka langsung. Peran internet seperti masih minor bagi sebagian orang. Namun, pandemi telah mengubah segalanya yang paling tampak adalah semakin berkurangnya kativitas manusia untuk bertatap muka. Internet menjadi bahan bakar baru bagi seluruh kegiatan dan aktivitas manusia. Teknologi yang memungkinkan dan mendukung kegiatan jarak jauh, bahkan dari rumah tiba-tiba menjadi instrumen mayor bagi manusia. Kebutuhan pada internet tidak bisa ditolak lagi oleh sektor mana pun, termasuk ekonomi.

Pandemi tidak hanya mengubah pola aktivitas manusia yang awalnya didominasi secara luring sekarang menjadi daring. Pola dan arah nilai ekonomi dunia mulai berubah. Pada awalnya negara-negara di dunia berkompetisi secara ekonomi maka pada masa pandemi negara-negara di dunia sepertinya sangat kompak untuk saling membantu. Peneliti di sini tertarik pada perubahan nilai ekonomi masa depan yang dikemukakan oleh peneliti dari University of Surrey Simon Mair, karena memang sangat relevan dengan

kondisi yang ada sekarang. Dalam studinya (Mair, 2020) membagi pola nilai ekonomi menjadi empat kuadran seperti di bawah ini:

Dari Gambar 5.1, yang pertama ada negara dengan *State Capitalism*; pada model pertama ini respons pemerintah pusat menjadi kunci utama dengan memprioritaskan perubahan nilai ekonomi (keuntungan). Model *State Capitalism* sering kita jumpai



Gambar 5.1 The Four Futures (Simon Mair, 2020).

sekarang di beberapa negara di dunia. Contoh negara yang memiliki tipikal ini antara lain, United Kingdom, Denmark, dan Spanyol. Masyarakat pada tipe ini berusaha mengejar perubahan nilai ekonomi sebagai jalan untuk perekonomian yang lebih baik. Mereka mengakui memerlukan peran negara pada saat terjadi krisis.

Ketika pandemi melanda, banyak pekerja sakit dan kehilangan

pekerjaan dan pemerintah berperan menjaga kesejahteraan warganya dengan masif memberlakukan resep *Keynesian*, pemberian stimulus kredit usaha dan bantuan langsung pada dunia usaha. Mungkinkah ini skenario yang berhasil? Mungkin, tetapi hanya jika COVID-19 terbukti dapat dikendalikan dalam waktu singkat. Karena *lock down* dihindari untuk mempertahankan fungsi pasar, penularan infeksi kemungkinan masih berlanjut. Di Inggris misalnya, konstruksi non-esensial masih berlanjut dan meninggalkan pekerja bercampur di lokasi bangunan. Tetapi intervensi negara yang terbatas akan semakin sulit dipertahankan jika jumlah kematian meningkat. Meningkatnya penyakit dan kematian akan memicu keresahan dan memperdalam dampak ekonomi serta memaksa negara untuk mengambil tindakan yang lebih radikal untuk mencoba mempertahankan fungsi pasar.

Barbarism; model responsnya seperti desentralisasi dengan memprioritaskan perubahan nilai ekonomi. Model ini juga dikatakan sebagai skenario paling suram. Dalam skenario ini ketika jumlah korban meningkat, korban PHK naik tajam dan terjadi kelaparan karena tidak adanya skenario jaring pengaman dari negara. Mungkinkah ini terjadi? Kekhawatirannya adalah hal itu bisa terjadi karena kesalahan selama pandemi atau karena disengaja setelah puncak pandemi. Kesalahannya adalah jika pemerintah gagal turun tangan dalam cara yang cukup besar selama pandemi terparah. Dukungan mungkin ditawarkan kepada bisnis dan rumah tangga, tetapi jika ini tidak cukup untuk mencegah keruntuhan pasar dalam menghadapi penyakit yang meluas, kekacauan akan terjadi. Rumah sakit mungkin akan dikirim dana tambahan dan orang. Tetapi, jika itu tidak cukup, orang yang sakit akan ditolak dalam jumlah besar. Negara dan pasar akan kacau. Masyarakat akan bertindak sendiri-sendiri sesuai kepentingan masing-masing, bahkan muncul kerusu-

han yang berdimensi sosial dan politik, dan institusi negara gagal menjalankan fungsinya

State Socialism; respons terpusat pada pemerintah pusat dengan prioritas melindungi kehidupan warga. Model ini menggambarkan masa depan pertama yang dapat kita lihat dengan pergeseran budaya yang menempatkan jenis nilai yang berbeda di jantung perekonomian. Ini adalah masa depan yang kita tuju dengan perluasan dari tindakan yang saat ini kita lihat di Inggris, Spanyol, dan Denmark. Kuncinya di sini adalah bahwa tindakan seperti nasionalisasi rumah sakit dan pembayaran kepada pekerja tidak dilihat sebagai alat untuk melindungi pasar, tetapi cara untuk melindungi kehidupan itu sendiri. Dalam skenario seperti itu, negara turun tangan untuk melindungi bagian-bagian ekonomi yang penting bagi kehidupan: produksi pangan, energi, dan tempat tinggal misalnya, sehingga kebutuhan dasar kehidupan tidak lagi sesuai dan mengikuti dengan keinginan pasar.

Jika resesi mendalam terjadi dan ada gangguan dalam rantai pasokan sehingga permintaan tidak dapat diselamatkan oleh jenis kebijakan *Keynesian* yang kita lihat sekarang (mencetak uang, membuat pinjaman lebih mudah didapat, dan sebagainya), negara dapat mengambil alih produksi. Ada risiko dalam pendekatan ini. Kita harus berhati-hati untuk menghindari otoritarianisme. Tetapi jika dilakukan dengan baik, ini mungkin harapan terbaik kami melawan wabah COVID-19 yang ekstrem. Negara yang kuat yang mampu mengumpulkan sumber daya untuk melindungi fungsi inti ekonomi dan masyarakat.

Terakhir *Mutal Aid*, kebijakannya desentralisasi dengan prioritas melindungi kehidupan warga. Saling membantu adalah masa depan kedua di mana kita mengadopsi perlindungan kehidupan sebagai prinsip penuntun perekonomian kita. Namun, dalam ske-

nario ini, negara tidak mengambil peran yang menentukan. Sebaliknya, individu dan kelompok kecil mulai mengatur dukungan dan kepedulian dalam komunitas mereka. *Mutual Aid* dapat memungkinkan pencegahan penularan yang lebih efektif dengan membangun jaringan dukungan komunitas yang melindungi mereka yang rentan dan aturan isolasi dari aparat. Bentuk paling ambisius dari masa depan ini melihat munculnya struktur demokrasi baru. Pengelompokan komunitas yang mampu memobilisasi sumber daya substansial dengan kecepatan relatif. Orang-orang berkumpul untuk merencanakan tanggapan regional guna menghentikan penyebaran penyakit dan (jika mereka memiliki keterampilan) untuk merawat pasien.

Peneliti melihat kombinasi antara *State Socialism* dan *Mutual Aid*, bisa meyelamatkan posisi negara dan perekonomian dari ancaman *Barbarism*. Kebijakan pemerintah saja tidak akan cukup mengatasi persoalan pandemi yang sudah merusak pasar, sampai vaksin belum ditemukan kita semua tidak tahu kapan pasar akan kembali berjalan normal. Kombinasi kelembagaan formal (pemerintah) dan komunitas masyarakat akan menjadi kunci bagi cepat atau tidaknya pemulihan perekonomian saat dan pascapandemi. Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya, Bank Indonesia dengan kebijakan moneternya sudah melakukan upaya kontersiklis.

Namun, selama kebijakan kesehatan yang diambil masih belum berubah secara radikal seperti sejak awal terjadinya pandemi maka perekonomian akan semakin sulit untuk kembali normal dan pasar tidak akan menjalankan fungsinya dengan sempurna. Apalagi hingar-bingar dan polemik isu politik terus bermunculan di tengah pandemi. Elit seolah masih tidak bisa membedakan mana kondisi pandemi dan kondisi normal. Jika ini terus berlanjut, proses *mutual aid* tidak akan berjalan. Pandemi akan dijadikan

arena kompetisi untuk menunjukkan keunggulan masing-masing identitas politiknya. Kebijakan ekonomi akan percuma dan hanya menanggung beban biaya ekonomi yang lebih tinggi lagi. Bukan tidak mungkin akan ada pihak yang akan memanfaatkan kondisi seperti ini ke arah *state barbarism*.

Sampai penelitian ini ditulis pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berjalan sekitar tujuh bulan. Perubahan yang dipercepat di segala lini ekonomi sedang terjadi dan kapan akan berakhirnya pandemi ini belum juga menemukan jawaban pasti. Jumlah korban positif COVID-19 per tanggal lima Oktober sudah tembus 300 juta jiwa lebih. Dari sisi pertumbuhan ekonomi mencatat bahwa pada kuartal pertama 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi 3%. Pada periode ini dampak pandemi terhadap perekonomian memang belum terasa parah secara agregat. Memasuki kuartal kedua kontraksi ekonomi terasa hebat, di mana pertumbuhan ekonomi pada kuartal dua 2020 mencapai -5,3% angka yang sangat mengejutkan mengingat pertumbuhan ekonomi terakhir minus pada tahun 1998 saat krisis ekonomi.

Kekhawatiran akan resesi ekonomi pun mencuat apalagi jika kita mengambil definisi sederhana terkait resesi, di mana jika selama dua kuartal beturut-turut pertumbuhan ekonomi nasional minus maka dikatakan perekonomian sedang mengalami resesi. Dalam arah ini peneliti membuat prediksi terjadinya ekonomi di Indonesia sebagai dampak pandemi. Tentu, namanya prediksi bisa tepat atau tidak. Untuk memprediksi terjadinya resesi peneliti menggunakan *big data* dari *google mobility* hingga data terakhir pada 25 September 2020.

Dari data tersebut terdapat asumsi bahwa setiap terjadi pengurangan 1% mobilitas maka terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,28%. Berdasar asumsi tersebut data diolah

sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi pada Q2:2020 sebesar -5,32%. Mengikuti asumsi kesalahan terkait pertumbuhan $\pm 1\%$. Dari *google mobility* tercatat rata-rata pergeseran mobilitas sampai 25 September 2020 (sudah memasuki Q3) adalah -14%. Maka kontraksi yang terjadi pada Q3:2020 adalah $(-14\% \times 0,28\%) = -4,5\%$. Dari angka ini kemudian dihitung menjadi estimasi atau perkiraan pertumbuhan pada Q3:2020 $(-5,32\% - (-4,5\%)) = -0,82\%$. Artinya, pada kuartas ketiga (Q3) pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dibandingkan dengan periode Q2 di 2020, meskipun ada kenaikan tetapi masih minus. Hal ini menandakan bahwa dipastikan ekonomi Indonesia akan masuk dalam periode resesi ekonomi pada 2020.

Jika sampai Desember *mobility changes* konstan atau tidak berubah secara drastis di angka -14% maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q3 minus (-0,85%). Namun apabila ada kecenderungan kontraksi meningkat atau *mobility changes* kembali turun akibat kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau kebijakan apa pun yang bisa memengaruhi mobilitas manusia untuk melakukan aktivitas maka asumsi +1% bisa saja terjadi. Artinya, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi -1,85%. Menyikapi hal ini pemerintah pusat dan daerah harus berhati-hati dan pandai berhitung apabila akan mengambil kebijakan terkait pembatasan aktivitas ekonomi. Kenapa demikian? Karena *google mobility change* mencatat beberapa komponen yang langsung berhubungan dengan mobiltas manusia, di antaranya; kunjungan ke tempat retail dan rekreasi, kunjungan ke grosir dan apotik, kunjungan ke taman, stasiun terminal, tempat kerja, dan rumah.

Kondisi resesi akibat pandemi memang berbeda dengan resesi yang ditimbulkan oleh guncangan pada variabel ekonomi sehingga diperlukan tidak hanya bauran kebijakan fiskal dan moneter yang

kontersiklis dan akurat, tetapi juga harus didukung oleh kebijakan kesehatan yang mendukung bagi bekerjanya mekanisme kebijakan ekonomi. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan di sektor kesehatan akan berdampak pada ongkos resesi yang akan semakin tinggi. Stimulus fiskal dan moneter akan tidak berguna sama sekali yang berakibat pada pemulihan ekonomi nasional tidak bisa dipercepat.

Dukungan stimulus fiskal yang sudah dilakukan pemerintah tidak bisa dikatakan kecil. Tercatat 35 persen dari APBN sudah difokuskan untuk penanganan pandemi. Belum lagi tambahan bantuan langsung sebesar Rp600 ribu untuk karyawan yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Seluruh penjuror diberikan stimulus untuk menajada *agaregate demand* masyarakat. Dari sisi *supply* (pasokan) juga demikian, stimulus kredit usaha rakyat juga digencarkan. Bahkan, menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan membutuhkan stimulus fiskal yang besar. Diperkirakan defisit Anggaran Penerimaan dan belanja Negara (APBN) pada 2020 akan mencapai 6,34 persen. Angka yang besar mengingat defisit APBN beberapa tahun belakangan sekitar 2-4 persen. Memang langkah ini sudah tepat dilakukan untuk menjaga perekonomian tidak terus merosot dan mengalami kontraksi. Inilah sebuah upaya yang harus dilakukan pemerintah agar negara hadir di tengah keterpurukan kondisi ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

Sampai kapan stimulus fiskal akan diberikan, tentu bergantung pada kesediaan vaksin dan kapan gelombang kedua penyebaran COVID-19 akan terjadi. Hal ini membutuhkan dukungan dari pemangku sektor kesehatan untuk bisa menjawab kapan vaksin akan tersedia dan gelombang kedua (*second wave*) akan terjadi. Jika tidak, APBN akan menanggung biaya resesi yang akan semakin besar

karena ketidakpastian dari variabel kesehatan. Pasar juga tidak akan cepat berfungsi secara normal kembali, bukan tidak mungkin gelombang PHK akan terus berlanjut. Kebijakan ekonomi sudah berada pada jalur yang tepat dengan langkah benar. Kita tinggal menunggu respons kebijakan kesehatan karena secepat apapun kebijakan ekonomi akan menjadi tidak berguna apabila kebijakan kesehatan masih dikelola secara amatiran. •

Bagian 6

Strategi UMKM Saat Pandemi COVID-19

oleh Jaka Nugraha

6.1 Analisis Kewirausahaan

Analisis kewirausahaan merupakan analisis bagaimana peran kewirausahaan dalam mendukung perekonomian. Mudjiarto dan Wahid (2006) mengemukakan bahwa kewirausahaan merupakan sifat seseorang yang mempunyai karakter inovatif dan kreatif. Upaya-upaya inovatif dan kreatif dijalankan dengan mengembangkan ide dan meramu sumberdaya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup.

Analisis kewirausahaan masa pandemi COVID-19 dilakukan untuk menganalisis bagaimana respons kewirausahaan masyarakat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang sedang krisis akibat pandemi COVID-19. Selain itu, juga akan dibahas bagaimana peran digital dalam menyokong perekonomian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif, yang terdiri dari *strengths*, *weakness*, *opportunities*, dan *threats*. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Dari pengertian SWOT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Evaluasi Faktor Internal

- 1) Kekuatan (*strength*), yaitu kekuatan apa yang dimiliki UMKM Indonesia. Dengan mengetahui kekuatan, UMKM dapat dikembangkan menjadi lebih tangguh hingga mampu bertahan dalam pasar dan mampu bersaing untuk pengembangan selanjutnya selama masa pandemi COVID-19 dan pascapandemi COVID-19.
- 2) Kelemahan (*weakness*), yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi UMKM selama masa pandemi COVID-19.

b. Evaluasi Faktor Eksternal

- 1) Kesempatan (*opportunities*), yaitu semua kesempatan yang ada, seperti kebijakan pemerintah, peraturan yang berlaku atau kondisi perekonomian nasional atau global yang dianggap memberi peluang bagi UMKM selama pandemi COVID-19 untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang.
- 2) Ancaman (*threats*), yaitu hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi UMKM selama pandemi COVID-19, seperti penggerusan potensi pasar melalui daya beli yang turun dan pengutamaan higienitas produk selama pandemi COVID-19.

Alternatif strategi adalah hasil dari matrik analisis SWOT yang menghasilkan berupa Strategi SO, WO, ST, dan WT. Alternatif strategi yang dihasilkan minimal 4 buah strategi sebagai hasil dari analisis matrik SWOT. Strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: a) Strategi SO, strategi itu dibuat berdasarkan jalan pikiran memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya; b) Strategi ST, strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman; c) Strategi WO, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, dan d) Strategi WT, strategi ini didasarkan pada kegiatan usaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

6.2 UMKM Masa Pandemi Koronavirus

Ancaman krisis ekonomi dengan merebaknya pandemi COVID-19 kian nyata terjadi dan berisiko memberikan dampak lanjutan dalam eskalasi yang sangat besar di setiap sektor. Beberapa im-

plikasi yang diakibatkan oleh krisis multidimensi adalah me-rosotnya daya beli dan konsumsi masyarakat, bursa saham yang hampir di seluruh penjuru dunia mengalami gejolak yang menuju ketidakpastian. Selain itu, menurunnya produktivitas kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tentu saja Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak cukup besar dengan kerugian yang tidak sedikit. Produk Domestik Bruto (PDB) yang selalu dijadikan acuan pertumbuhan ekonomi merupakan keseluruhan kegiatan produksi dalam suatu negara dalam kurun waktu selama satu tahun.

Sebagai sebuah negara maritim, perdagangan merupakan bidang yang cukup memberikan persentase besar dalam akumulasi tersebut. Dominasi UMKM dalam perekonomian Indonesia terbukti memberikan sumbangsih yang luar biasa pada saat terjadinya krisis moneter pada 1998. Data tahan UMKM dalam menjaga konsumsi masyarakat dinilai mampu menopang perekonomian pada saat itu. Akan tetapi, pandemi COVID-19 memiliki perbedaan, secara langsung UMKM mendapatkan pukulan dengan berbagai macam persoalan untuk keberlangsungan dirinya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada 2020 telah dirilis besarnya UMKM yang mengalami kebangkrutan sebesar 47 persen. Selain akibat pandemi COVID-19, masalah internal berupa pengelolaan arus kas yang kurang baik disertai menurunnya daya beli dan permintaan masyarakat menyebabkan tekanan yang besar terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Peran UMKM yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti dari kontribusi terhadap PDB yang menyumbang 60 persen PDB 2019 dan memberikan sumbangsih sebesar 14 persen pada total ekspor nasional. Namun kini, sektor

UMKM menjadi salah satu sektor yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Ketahanan terhadap krisis yang pernah berhasil dilakukan pada 1998, sekali lagi harus diuji dengan skala yang lebih besar dan kompleks serta segera harus ditemukan solusi dan jalan keluarnya. Tingginya angka kemiskinan baru dan besarnya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi permasalahan lain yang secara tidak langsung akan menambah merosotnya daya beli masyarakat.

Aspek daya beli dan konsumsi masyarakat memberikan dampak pada banyaknya perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja pada perusahaannya. Tidak sedikit juga perusahaan merumahkan, memberikan cuti tanpa gaji, dan memberikan opsi untuk mengundurkan diri tanpa pesangon. Utamanya, bagi mereka yang menggantungkan hidup terhadap sektor informal dan pekerja harian. Ketidakpastian seperti saat ini menyebabkan sebagian besar masyarakat sangat berberhati-hati dalam mengelola keuangan dan pengeluarannya. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian mengenai kapan pandemi akan selesai. Saat ini pemerintah dan masyarakat dituntut untuk bersiap menghadapi kondisi darurat dan melakukan tindakan-tindakan responsif untuk mengantisipasi dampak COVID-19 pada sektor ekonomi dan bisnis secara keseluruhan.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia serta pemberlakuan *Work From Home* (WFH) bagi pegawai swasta maupun pemerintah memberikan pengaruh kepada aktivitas UMKM. UMKM menghadapi masalah dengan permasalahan bahan baku, merosotnya jumlah penjualan, terhambatnya rantai pasok produksi serta distribusi, sulitnya akses modal, pengetahuan teknologi informasi yang minim, dan jaringan usaha yang terbatas berakibat pada turunnya produktivitas bisnis

serta kemampuan UMKM untuk menghadapi perubahan, termasuk perubahan perilaku bertransaksi juga menjadi penghambat bagi sebagian pelaku UMKM.

Sebelum terjadinya pandemi kegiatan transaksi lebih banyak dilakukan menggunakan cara-cara manual. Tetapi, saat ini tuntutan digitalisasi mengharuskan pelaku UMKM berbenah dan beradaptasi. Situasi pandemi sekarang sebenarnya memberikan peluang serta tantangan kepada pemerintah dalam menjaga keberlanjutan UMKM. Tantangan di sini dapat didefinisikan sebagai dibutuhkannya solusi jangka pendek dalam mendukung UMKM dan tenaga kerja yang ada di dalamnya. Peluang di sini dapat dijelaskan sebagai sebuah solusi dalam jangka pendek yang dilanjutkan melalui solusi jangka panjang. Hal ini tentu harus sejalan dengan era digitalisasi ekonomi dan revolusi industri 4.0 yang memberikan syarat tersedianya teknologi digital dalam membantu aktivitas ekonomi dan bisnis.

Pada umumnya, UMKM Indonesia terbagi menjadi kluster besar, yaitu kluster produsen, usaha dagang, dan jasa. Produsen lebih menekankan pada produksi aneka makanan dan minuman, termasuk aneka sandang seperti sepatu, tas, pakaian atau batik, kerajinan atau souvenir, percetakan, mebel, dan industri kreatif. Cakupan usaha dagang meliputi UMKM pada sektor informal, kafe, restoran, dan sebagainya. Sedangkan pada usaha jasa meliputi seperti jasa transportasi *online*, travel umroh dan wisata, pengadaan barang atau jasa, klinik, desain dan percetakan, dan sebagainya. Semua bidang usaha dari UMKM tersebut sangat bergantung kepada pergerakan manusia sebagai subyek utama dalam perekonomian. Apabila kebijakan bekerja dari rumah dan PSBB diberlakukan maka berakibat pada ketidakpastian berjalannya UMKM, bahkan yang masih bertahan pun akan sangat mungkin menutup usahanya.

Secara umum persoalan yang dihadapi oleh UMKM selama pandemi adalah sebagai berikut:

1. Mengalami penurunan penjualan

Masyarakat Indonesia mengalami penurunan minat dalam membeli barang-barang jenis tertentu disebabkan oleh meluasnya penyebaran virus dan pemberlakuan pembatasan kegiatan oleh pemerintah. Riset GfK 2020 menyebutkan bahwa masyarakat cenderung untuk melakukan aktivitas belanja melalui daring dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari, seperti produk kebersihan, makanan minuman, dan perawatan.

2. Sulit mendapatkan bahan baku dan terhambatnya distribusi

Bahan baku yang masih impor menjadi penyebab tingginya harga yang harus ditebus UMKM. Beberapa negara pengeksport kedelai seperti Amerika memberikan kebijakan yang ketat dalam keluar masuk barang ke negara-negara tujuan ekspor dengan kasus yang tinggi. Distribusi bahan baku yang lebih banyak didominasi lewat jalur laut menyebabkan rantai pasok tertahan di pelabuhan dalam waktu yang cukup lama.

3. Mengalami kesulitan permodalan

Daya beli masyarakat yang menurun disertai merosotnya penjualan menjadi tantangan UMKM untuk tetap bisa bertahan dalam kondisi seperti saat ini. Perputaran modal otomatis terganggu akibat berubahnya perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung membatasi pengeluaran untuk hal-hal yang lebih penting, misalkan perlindungan kesehatan dan keamanan.

4. Terhambatnya produksi

Kesulitan pasokan bahan baku dan pembatasan jam operasional dalam rangka penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas usaha praktis memangkas produksi UMKM. Pemberlakuan PSBB berimplikasi pada efektivitas kinerja produksi dalam hal

terlalu lamanya pasokan bahan baku bisa diolah.

5. Perbedaan skala UMKM memiliki persoalan yang berbeda

Daya tanggap atau respons UMKM tentu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Usaha mikro tentu mengalami tingkat kompleksitas yang berbeda apabila dibandingkan dengan persoalan usaha menengah, misalkan dilihat dari sudut pandang permodalan dan jumlah tenaga kerja. Usaha menengah sudah pasti memiliki cadangan kas yang lebih besar dapat digunakan untuk mempertahankan gaji, biaya *overhead* dan pemeliharaan mesin produksi. Akan tetapi, dengan turunnya penjualan dan konsumsi yang rendah usaha menengah dan besar hanya mampu memprediksi keberlangsungan usaha mereka paling lama empat bulan. Secara kalkulasi berdasarkan besarnya jumlah modal yang dimiliki usaha mikro kecil mungkin berjuang bahkan durasi yang lebih singkat karena kurangnya modal. Usaha mikro lebih mudah beradaptasi mengubah model bisnis mereka dengan sangat cepat karena untuk ukuran mereka. Di sisi lain, usaha menengah dan besar dengan jumlah karyawan yang besar akan berjuang untuk mempertahankan *overhead* dan menerapkan perubahan arah bisnis.

Pada kondisi yang demikian diperlukan strategi yang cepat dan terukur untuk menjaga eksistensi dari usaha yang telah dijalankan UMKM. Selama pandemi masih ada di Indonesia setidaknya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh UMKM, antara lain:

1. UMKM meninjau kembali model bisnis yang telah dijalankan sebelumnya

UMKM sangat perlu menilai kembali bisnis mereka model cocok untuk normal baru. Mereka harus menilai kembali ekspektasi pasar dan lebih peka terhadap perubahan kebiasaan. UMKM

perlu mengeksplorasi hal yang baru di pasar mereka, segmen pelanggan baru, perkenalkan produk baru, desain ulang ukuran kemasan dan jumlah yang sesuai serta relevan dengan pasar baru. Tentu saja setelah melakukan kajian mengenai kemungkinan konsumen bersedia untuk berbelanja secara *online* maupun *offline*. UMKM perlu memprediksi apa yang mungkin muncul dari normal baru.

2. Penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional

Perubahan perlu dilakukan dalam hal penganggaran dan pengeluaran. UMKM tidak bisa hanya bergantung pada upah pekerja yang lebih rendah atau mengharapkan biaya operasional turun. Oleh karena itu, UMKM harus mempertimbangkan penerapan teknologi informasi, digitalisasi, dan menerapkan solusi *e-commerce* untuk mengurangi biaya, serta menghemat waktu dan sumber daya. Beberapa hambatan penerapan teknologi pada UMKM adalah kurangnya modal investasi, keterampilan manajerial yang buruk, kurangnya karyawan terampil, dan keterbatasan akses pada sektor keuangan dan permodalan. UMKM juga perlu belajar bagaimana memanfaatkannya platform media sosial untuk tujuan pemasaran dan *branding*, pada akhirnya untuk menjangkau ke volume pelanggan yang lebih tinggi.

3. Meningkatkan manajemen risiko

UMKM harus membangun cadangan kas setiap ada kesempatan. Hal ini akan membuat UMKM mampu memberikan perlindungan untuk usaha yang dijalankan selama terjadinya ketidakpastian. Mereka harus menahan diri dari investasi yang berlebihan melalui ekspansi dan pembelian aset utama. Perdagangan UMKM dalam perdagangan internasional juga harus

mempraktikkan lindung nilai valuta asing (*hedging*) untuk tujuan manajemen risiko.

4. Penerapan pembayaran tanpa uang tunai (*cashless transaction*)
UMKM harus menerapkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai untuk meminimalisir risiko adanya kontaminasi virus dari uang kertas dan koin fisik. Transaksi tanpa menggunakan uang tunai bisa dilakukan melalui pembayaran di dompet elektronik, kartu debit dan kredit.
5. Penerapan protokol kesehatan kerja yang ketat dan standar keamanan

Banyak UMKM gagal memenuhi persyaratan dalam menjalankan protokol kesehatan pada lingkungan usaha. Akan tetapi tindakan pencegahan seperti memakai masker wajah, pemeriksaan suhu tubuh secara berkala pada para pekerja, jarak sosial, dan sanitasi proses perlu dilakukan. Selain menjadi kebijakan dari pemerintah, tanggung jawabnya aktif pelaku UMKM sangat penting untuk mencegah merebaknya virus di tempat usaha. Tata letak fisik beberapa ruangan tentu harus disesuaikan dengan ketentuan jarak sosial (*social distancing*). Pemberlakuan rotasi pada jam kerja dan pekerja (bekerja secara bergantian dari ruangan rumah pada hari yang berbeda, dan meminimalkan jumlah orang secara fisik hadir di kantor UMKM) mungkin merupakan solusi, akan tetapi hal ini juga bisa berdampak buruk produktivitas.

6. Mengikuti perkembangan informasi
UMKM harus mengikuti perkembangan pemerintah saat memberikan informasi mengenai perkembangan COVID-19 dari waktu ke waktu sehingga merespons setiap perubahan dalam meminimalisir risiko yang akan dihadapi.

6.3 Krisis Segera Berakhir

Krisis segera akan berakhir apabila sudah memenuhi tiga kerangka waktu berikut: **Respond** (kemampuan untuk menanggapi), yang mana organisasi bisnis (UMKM) menghadapi situasi saat ini dan mampu untuk mengelola keberlanjutan usaha; **Recover** (Kemampuan untuk memulihkan diri), yang mana organisasi bisnis belajar dan menjadi lebih kuat; dan **Thrive** (kemampuan untuk berkembang), merupakan tempat organisasi bisnis mempersiapkan dan membentuk “*next normal*”.

Organisasi bisnis akan merespons krisis melalui ketangguhan pemimpin didefinisikan bersama kualitas melekat pada dirinya dan mampu memosisikan diri apakah pada situasi bertahan atau berkembang. Selanjutnya, pemimpin yang tangguh harus mengambil tindakan spesifik yang mencakup tiga dimensi dan mengevaluasinya dalam konteks lokasi, geografis, dan sektor. Pemimpin organisasi memandang bahwa *recovery* sebagai sebuah perjalanan untuk organisasi, tim, dan pemangku kepentingan mereka. Ada lima indikator dalam fase *recovery* yang mampu menjadi landasan organisasi bisnis untuk bisa merespons krisis dengan cepat dan mengatasinya:

- a. Memahami perubahan pola pikir yang diperlukan;
- b. Mengidentifikasi dan mengarahkan ketidakpastian dan implikasinya;
- c. Menanamkan kepercayaan sebagai katalisator untuk pemulihan;
- d. Tentukan tujuan dan luncurkan buku pedoman pemulihan; dan
- e. Belajar dari kesuksesan orang lain.

6.4 Pemanfaatan Teknologi untuk Mendukung *Recovery* dan Menghasilkan Perubahan

Dampak pandemi COVID-19 telah langsung dan menjangkau jauh, menyebar ke seluruh domain geografis, demografis, dan

ekonomi secara bersamaan. Sifat ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mendorong organisasi bisnis dan orang-orang yang membawa mereka pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak terkecuali pada seluruh bagian pada organisasi bisnis, terutama yang memimpin pada bagian pengelolaan teknologi informasi (CIO/*Chief Information Officer*). Mereka harus menghadapi permasalahan multidimensi untuk terus mempertahankan keberlangsungan usaha. Permintaan pelanggan yang berubah pada saluran digital, *supply chain* yang dikonfigurasi ulang, *bandwidth* dan kapasitas tenaga kerja, lisensi dan peralatan untuk mendukung pekerjaan jarak jauh, dan sejumlah masalah lain yang memerlukan skala serta ketahanan segera. Belum pernah ada waktu di mana peran CIO dan pemimpin teknologi digital lainnya begitu penting untuk membentuk masa depan organisasi bisnis mereka.

Saat pandemi mematikan dunia fisik-bisnis, sekolah, arena olahraga, belanja dan hiburan, dan lain-lain. Pasti selanjutnya banyak orang akan berasumsi bahwa dunia digital akan turun tangan dan mengisi jurang. Tapi apakah itu akan benar-benar terjadi? Pemimpin yang tangguh perlu menghadapi tantangan dan melihat peluang dengan apa adanya. Kesempatan untuk tidak hanya membantu organisasi mereka berdiri tegak, tetapi juga untuk memastikan bahwa kapabilitas teknologi melengkapi organisasi untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun tidak ada peta jalan yang terbukti tersedia untuk menangani krisis kemanusiaan global dengan skala COVID-19. Secara umum, pembuat keputusan teknologi di setiap organisasi bisnis telah membuat pilihan yang signifikan, yaitu **Respond** dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 dengan kecepatan untuk memaksimalkan keselamatan karyawan dan memastikan kelangsungan bisnis. Secara bertahap, saat pandemi mulai berkembang, mereka harus beralih ke dua fase berikutnya:

Recover dan Thrive.

1. Mulai dengan Cepat Pemulihan untuk Memastikan Skalabilitas

Mengingat kompleksitas pandemi, ada alasan untuk percaya bahwa fase pemulihan COVID-19 akan membutuhkan tingkat orkestrasi, komunikasi, dan perubahan konfigurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi berlarut-larut di seluruh dunia. Bagi banyak organisasi bisnis, langkah pertama yang mereka ambil selama fase ini akan banyak melakukan serangkaian penyesuaian yang diperlukan seperti saat awal krisis terjadi dan memuncak. Hal ini bisa diartikan bahwa mereka harus mampu mengidentifikasi dan mengenali kesalahan langkah yang diambil selama fase awal pandemi berlangsung dan berkomitmen lagi untuk perbaikan berkelanjutan.

Mendukung dan Meningkatkan Tenaga Kerja yang Berpengalaman untuk Berkolaborasi dan Co-Creation.

Melibatkan dan mendukung tenaga kerja, terutama mereka yang tidak terbiasa bekerja dari jarak jauh adalah tugas yang menantang, tetapi ada peluang besar untuk percepatan tempat kerja yang digital. Dalam banyak hal, masa depan pekerjaan ada di sini. Ini telah membawa urgensi baru pada kebutuhan para pemimpin teknologi untuk memastikan bahwa tenaga kerja mereka dilengkapi dan dilatih untuk menangani lingkungan virtual baru, bahwa alat kolaborasi efektif, dan bahwa koneksi virtual sedang dibuat di seluruh organisasi tanpa adanya ruang kerja fisik. Selain itu, mereka sekarang menghadapi kebutuhan untuk menggunakan alat dan sumber daya yang muncul untuk mengelola dan mengatasi stres dan kesehatan mental, di tengah kurangnya interaksi fisik dan sosial.

Teknologi yang Aman akan Mendukung Lingkungan Kerja Baru

Penempatan pekerja dalam skala besar di seluruh jaringan lokasi terpencil yang luas telah menempatkan keamanan dan ketersediaan sistem di bawah tekanan yang signifikan. Pekerjaan jarak jauh juga mengekspos banyak sistem tanpa *patch* yang meninggalkan akses istimewa di tempat terbuka, tidak dilindungi oleh *firewall* perusahaan. Dalam rentang waktu beberapa minggu yang singkat, *e-mail phishing* melonjak dan peretasan. Gangguan yang mengganggu termasuk video yang menampilkan komentar rasis, bahasa agresif, dan konten pornografi. Pada akhirnya, tantangan ini adalah tentang mengelola risiko dan memastikan ketahanan digital.

Membuat Pedoman untuk Perubahan di Masa Depan

Ini bukanlah krisis kesehatan pertama yang dihadapi dunia dan bukan yang terakhir. Lebih cepat lagi, para pemimpin organisasi bisnis perlu bersiap menghadapi potensi gelombang kedua atau ketiga yang terkait dengan pandemi COVID-19. Saat organisasi mereka menilai risiko dan mengembangkan rencana serta tindakan mitigasi risiko selama fase respons krisis ini, banyak pelajaran yang dipetik. Bagian penting dari upaya pemulihan harus mendokumentasikan area yang membutuhkan perbaikan dalam organisasi dan mengambil tindakan korektif dari perspektif perencanaan untuk menghindari kesalahan di masa depan. Bagian dari proses itu harus melibatkan perencanaan skenario berkelanjutan dari potensi risiko yang belum dipertimbangkan dan implikasinya pada teknologi untuk menjalankan bisnis secara berbeda. Proses ini harus membandingkan, menganalisis, dan memilih skenario alternatif terbaik dan menyajikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan yang ditunjuk.

2. Stabilkan Operasi Bisnis untuk Kesiapan di Masa Depan

Dunia pada akhirnya akan terbuka kembali untuk bisnis. Jika itu terjadi, perbaikan cepat dan solusi tambal sulam yang diadopsi selama fase respons pada masa pandemi mungkin tidak tahan terhadap pengujian yang ketat. Fase pemulihan akan melihat ketahanan jangka panjang menjadi prioritas yang lebih tinggi. Bagi banyak pemimpin organisasi bisnis dalam fase *recover*, berarti menstabilkan dan memperkuat banyak solusi dan proses yang tergesa-gesa dengan menjadi lebih bijaksana dan strategis tentang penerapannya, mengembangkan infrastruktur pendukung di sekitar mereka, dan sepenuhnya memahami dampak yang akan mereka hadapi, organisasi dan jaringan mitra mereka.

Tingkatkan Digital Inovasi dan Presence

Bagi banyak organisasi bisnis, pola pembelian yang dilakukan oleh pelanggan telah bergeser secara dramatis karena pemberlakuan *lockdown* dan karantina wilayah (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Yang paling tanggap merespons perubahan perilaku tersebut maka mereka telah melakukan inovasi dan memanfaatkan saluran digital untuk tetap terlibat dengan basis pelanggan loyal mereka. Hal ini sering kali didasarkan pada pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen dan hal-hal yang paling penting bagi mereka.

Dalam kasus COVID-19, secara langsung kebutuhan tersebut dapat tumbuh dan meningkat dengan pesat. Organisasi bisnis yang mampu memanfaatkan perubahan perilaku tersebut dan menggabungkannya dengan kemampuan untuk menyesuaikan bisnis mereka secara digital untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan mampu menciptakan “*moment that mattered*” bagi pelanggan mereka. Salah satu contohnya adalah *halodoc*, yang penggunaannya

telah melonjak dan menjadi arus utama di banyak wilayah dengan munculnya platform *telemedicine*, *chatbot* yang dikonfigurasi ulang untuk mendukung pasien jarak jauh, dan memungkinkan alat kolaborasi untuk pasien, keluarga mereka, dan dokter.

Sektor lain seperti layanan profesional, pendidikan, dan bahkan industri olahraga sedang didesain ulang melalui bentuk-bentuk baru dengan memanfaatkan platform digital. Tantangan bagi para pemimpin organisasi bisnis adalah menemukan fitur mana yang meningkatkan untuk dijadikan *project* yang dapat diterapkan secara permanen dalam organisasi. Pada tingkat yang jauh lebih kompleks, mereka perlu menemukan cara untuk lebih bijaksana dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa depan dan mendukung mereka melalui kapabilitas teknologi terkait dan integrasi terkoordinasi di seluruh organisasi mereka. Kemungkinan di dunia pasca-COVID-19 perusahaan akan dihadapkan pada *value chain*, *addressable market*, *customer preferences*, dan pesaing yang berbeda jika dibandingkan dengan yang mereka alami sebelum pandemi.

Post-Modernize Customer Support Operation

Volume call center di beberapa organisasi yang terdampak pandemi yang mengalami peningkatan selama krisis memperpanjang waktu tunggu hingga lebih dari 10 jam untuk beberapa orang. Solusi digital diharapkan akan mampu untuk dapat membantu mengatasi beberapa hambatan kelambatan respons layanan terhadap akses organisasi, misalnya organisasi kesehatan. Sementara saluran komunikasi tradisional seperti dukungan telepon atau surel mengalami permasalahan lambatnya layanan, organisasi perlu mengambil pendekatan inovatif untuk memikirkan kembali bagaimana seharusnya layanan dan dukungan pelanggan diberikan.

Misalkan dengan menemukan cara baru untuk menjangkau pelanggan mereka.

Perusahaan bisa saja menerapkan *AI-bots* yang intuitif dengan memanfaatkan lebih banyak saluran *online* yang mendukung AI, dan menciptakan cara bagi karyawan pusat panggilan untuk bekerja dari jarak jauh. Saluran interaksi pelanggan lainnya seperti *live chat*, atau saluran yang lebih informal seperti *WhatsApp* atau SMS, perlu diselaraskan, terhubung, dan diintegrasikan untuk memastikan layanan kepada pelanggan dapat tersampaikan dengan baik.

Organisasi bisnis yang menyediakan platform teknologi juga bisa menciptakan layanan dan alat gratis untuk mendukung pelanggan dan pasar mereka. *Amazon Web Services (AWS)*, misalnya memperluas penyediaan peralatan, dukungan teknis, dan kredit promosinya untuk mendukung kerja karyawan, pembelajaran, dan pengajaran jarak jauh. *ServiceNow* meluncurkan empat aplikasi tanggap darurat untuk membantu pelanggannya, termasuk lembaga pemerintah untuk memerangi wabah coronavirus global. Di Indonesia ada *start-up MediKatalog*, yaitu platform jual beli dan inventori stok otomatis Alat Pelindung Diri (APD) rumah sakit. Platform ini dapat membantu menjaga stabilitas stok APD dari produksi hingga bisa dapat digunakan tenaga medis sehingga bisa membantu memutus penularan COVID-19 dan memberikan perlindungan pada masyarakat dan tenaga medis.

Tokopedia, yang memiliki lebih dari 9 juta mitra berinovasi untuk berkolaborasi dengan mitra untuk bersama membuat produk yang mendukung program Adaptasi Kebiasaan Baru, misalkan masker. *Go-Jek*, *super-App* di Asia Tenggara yang memiliki layanan *GoRide* dan *GoCar* melakukan inovasi Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan (J3K) yang melindungi mitra dengan alat perlindungan

driver GoRide, fitur komitmen keamanan terhadap protokol J3K dan fitur *selfie* verifikasi masker. Para pemimpin teknologi perlu mengevaluasi langkah-langkah tambahan yang dapat mereka ambil untuk mendukung, mengaktifkan, dan memberdayakan pelanggan mereka dalam merespons dan memulihkan dengan lebih baik.

Ciptakan Arsitektur Teknologi Informasi (TI) yang Tangguh

Organisasi bisnis terkemuka telah mengembangkan pendekatan mereka terhadap arsitektur teknologi selama krisis agar tetap responsif dan fleksibel serta bersaing dengan organisasi yang lebih inovatif, seringkali dengan organisasi yang masih awal berdiri. Bisnis digital yang seringkali tidak terbebani oleh sistem lama dan *technical debt* telah bergerak dengan cepat dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pembelian dan pola kerja yang baru. Akan tetapi, respons dari beberapa organisasi bisnis yang lebih besar juga mengesankan. Kuncinya adalah dengan kebijakan meningkatkan investasi yang dilakukan. Memastikan *scalability* dan kecepatan layanan berbasis *cloud* adalah salah satunya.

Jika ada satu pelajaran yang dapat diambil, perusahaan yang telah berinvestasi dalam pendekatan platform berbasis *cloud* dan arsitektur modern untuk mendukungnya, misalnya *microservices*, strategi API, dan *low-code approaches*, memiliki *scalability* waktu yang jauh lebih mudah. Aplikasi mereka memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19, terutama yang beroperasi di berbagai wilayah geografis.

Reallocation Pendanaan pada Teknologi

Investasi teknologi telah mengalami banyak penyesuaian di banyak organisasi bisnis selama krisis terjadi. Beberapa program telah dihentikan sebagai bagian dari kebutuhan pemotongan

biaya yang lebih luas, sementara yang lain telah direncanakan ulang, dipersempit, atau disesuaikan. Sebaliknya, inisiatif baru telah diluncurkan dengan persetujuan langsung dari CEO dan CFO. Dalam jangka panjang, organisasi perlu mengembangkan pendekatan yang fleksibel untuk berinovasi dan beroperasi dengan cepat, dan ini akan membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara teknologi dan keuangan dalam hal penganggaran dan alokasi, baik dengan mendukung inovasi, bertahan dari bencana serta krisis atau kemungkinan transformasi digital.

Pengawasan terhadap Aset

Peningkatan digitalisasi aset dengan cepat akan menggeser batas keamanan dan berkontribusi pada ancaman serius bagi organisasi bisnis. Sangat penting memberikan kewaspadaan ekstra pada kejahatan *cyber* di seluruh bagian organisasi bisnis sehingga terhindar dari serangan dan kejahatan *cyber* yang agresif. Untuk menciptakan keamanan sistem dan teknologi informasi terbaik, pemimpin organisasi bisnis perlu memprioritaskan dua tugas khususnya: 1) mengumpulkan informasi atas ancaman *cyber* terbaru secara berkelanjutan serta melakukan proteksi, dan 2) memanfaatkan teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan *machine learning* untuk mengidentifikasi pola ancaman dan kemungkinan tanggapan melalui sistem pelindung.

3. Berkembang dalam Jangka Panjang dan Membentuk *Next Normal*

Saat organisasi bisnis sudah menandakan pada fase pemulihan, sangat penting untuk memperhatikan peta persaingan di masa depan, mengingat perubahan yang ditimbulkan oleh krisis akan membentuk *next normal*. Yang pasti, ada kemungkinan banyak

kesulitan-kesulitan dalam menangani pandemi dan dampak yang telah ditimbulkan. Akan tetapi, beberapa kemungkinan pergeseran dalam perilaku konsumen dan masyarakat yang lebih luas mulai terlihat. Para pemimpin organisasi bisnis yang mampu mengatasi perubahan ini akan membantu organisasi mereka berkembang dan bertahan.

Dalam beberapa bulan mendatang, lebih banyak organisasi bisnis akan meningkatkan respons mereka terhadap permintaan yang terus meningkat. Namun, sebagian besar belum mampu menyesuaikan dengan teknologi yang bersahabat dengan perilaku pelanggan dan masyarakat. Secara historis, komputer tidak dapat menghubungkan peristiwa dengan emosi manusia, tetapi itu berubah karena inovator menambahkan kecerdasan emosional (EQ) ke IQ teknologi dalam skala besar. Menggabungkan AI, *human-centered design techniques*, dan teknologi yang saat ini digunakan dalam penelitian neurologis untuk lebih memahami kebutuhan manusia akan dapat mengenali keadaan emosional pengguna dan kemudian merespons dengan tepat.

Nilai Baru yang Tercipta dari Physical dan Digital Worlds

Kemampuan simulasi dan pemodelan yang berkembang pesat, *interoperability* yang lebih baik dan sensor *Internet of Things* (IoT), serta ketersediaan peralatan dan infrastruktur komputasi yang lebih besar menutup jurang antara dunia fisik dan digital. Teknologi tersebut mampu digunakan untuk mengoptimalkan seluruh rantai nilai manufaktur, menangkap dan menganalisis data dalam jumlah besar, dan bahkan untuk membuat salinan digital dari *human heart* untuk meningkatkan keakuratan diagnosis klinis.

Bangun Kepercayaan sebagai Key Business Utama

Kepercayaan adalah aset tak ternilai yang dapat dengan cepat hilang apabila tidak dipertahankan dengan baik. Organisasi bisnis menyadari bahwa setiap aspek organisasi mereka yang didesain kembali oleh teknologi merupakan peluang untuk mendapatkan atau kehilangan kepercayaan. Riset Deloitte menemukan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dua kali lebih mungkin untuk mempertimbangkan konsekuensi etis dari penggunaan teknologi dibandingkan dengan perusahaan yang tumbuh lebih rendah. Kepercayaan bukan sebagai masalah privasi, kepatuhan, atau *public relation*, tetapi sebagai tujuan penting bisnis yang harus dicapai. Organisasi bisnis akan membedakan diri mereka dari persaingan dengan membangun kepercayaan *stakeholders* sebagai *key business* utama.

Para pemimpin organisasi bisnis akan terus melakukan evaluasi produk, layanan, dan keputusan yang mereka buat mengenai pengelolaan data, membangun ekosistem dengan mitra, dan pelatihan karyawan, adalah untuk membangun kepercayaan. Para pemimpin organisasi bisnis yang menanamkan nilai-nilai organisasi dan etika teknologi di seluruh organisasinya menunjukkan komitmen untuk *doing good* yang dapat membangun landasan kepercayaan jangka panjang dengan semua *stakeholders*. Organisasi bisnis sebaiknya merenungi kepercayaan yang telah didapat dan atau hilang selama krisis COVID-19 dan menyesuaikan kembali seperti pengalaman pelanggan, transparansi dalam penggunaan, pengelolaan, dan penyimpanan data. •

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2019. Laporan Sosial Ekonomi Indonesia. bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. 2020. Laporan Sosial Ekonomi Indonesia. bps.go.id
- Berg, Hendrik Van De. (2001). *Economic Growth and Development*. New York: McGraw-Hill.
- Bloom, David E. and Canning, D. (2020). *Epidemics and Economics. Harvard Initiative for Global Health*. Diunduh dari https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/1288/2013/10/BLOOM_CANNINGWP9.2006.pdf.
- BNPB. (2020a). Tugas dan Fungsi BNPB. Diakses melalui laman <https://bnpb.go.id/tugas-dan-fungsi-bnpb>
- BNPB. (2020b). Infografis Jumlah Terpapar COVID-19 di Indonesia. Diakses melalui laman <https://loker.bnpb.go.id/s/GugusTugasCOVID-19>.
- Cheisviyanny, Caroline. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak Indonesia*. Diunduh dari www.jurnal.stand.ac.id/index.php/JPI
- Ghalib, Rusli. (2005). *Ekonomi Regional*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Hanifa, N. dan Fisabilillah, LWP. (2021), "Peran dan Kebijakan

Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Welfare*, Vol. 2 No. 1, hal. 9-19

Harirah dan Rizaldi. (2020). Merespon Nalar Kebijakan negara dalam Menangani Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan kebijakan Publik di Indonesia*.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada 4 oktober 2020.

<https://www.bnppb.go.id/> diakses pada 2 Oktober 2020.

<https://www.bps.go.id/> diakses pada 3 Oktober 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 4 Oktober 2020.

https://www.gstatic.com/COVID-19/mobility/2020-09-27_ID_Mobility_Report_en.pdf

<https://www.kemenkeu.go.id/> diakses pada 2 Oktober 2020.

<https://www.kppod.org/> diakses pada 4 Oktober 2020.

<https://www.surabaya.go.id/> diakses pada 3 Oktober 2020

Kumorotomo, Wahyudi. (2020). *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Laporan Ekonomi Indonesia. 2019. bi.go.id

Laporan Ekonomi Indonesia. 2020. bi.go.id

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP YKPN.

Mair, Simon. (2020). COVID-19 Dispatch: Dr. Simon Mair Talk The Future of Work “An Ecological Marxist View. <http://rostraeconomica.nl/COVID-19-dispatch-dr-simon-mair-talks-the-future-of-work/>.

- Mattera, M., Soto Gonzalez, F., Alba Ruiz-Morales, C. and Gava, L. (2021), "Facing a global crisis - how sustainable business models helped firms overcome COVID", *Corporate Governance*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2020-0309>
- Minai, M.S., Raza, S. and Segaf, S. (2021), "Post COVID-19: Strategic Digital Entrepreneurship in Malaysia", Sergi, B.S. and Jaaffar, A.R. (Ed.) *Modeling Economic Growth in Contemporary Malaysia (Entrepreneurship and Global Economic Growth)*, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 71-79. <https://doi.org/10.1108/978-1-80043-806-420211007>
- Nicola, M.; Alsafi Z.; Sohrabi C.; Kerwan A.; Al-Jabir A.; Iosifidis C.; Agha M.; and Agha R. 2020. The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemi: A Review. *International Journal of Surgery*. Diunduh dari <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.04.018>.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. (2012). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Nurunnabi, M. (2020). Recovery planning and resilience of SMEs during the COVID-19: experience from Saudi Arabia. *Journal of Accounting & Organizational Change*. Vol. 16 No. 4, pp. 643-653. Diunduh dari <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2020-0095>
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2019). *Global Economy outlook 2020*.
- Lillie, Mark., Khalid Kark, Emily Mossburg, John Twaerdy. (2020).

COVID-19 Shaping the Future Through Digital Business. Deloitte Report. Deloitte Touche Tohmatsu Limited. London, United Kingdom.

- PwC Australia. (2020). The Possible Economic Consequences of a Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemi. Diunduh dari <https://www.pwc.com.au/publications/australia-matters/economic-consequences-coronavirus-COVID-19-pandemi.pdf>
- Qiu, W.; Rutherford, S.; Mao, A.; and Chu, C. (2017). The Pandemi and its Impacts. *Health, Culture and Society*. Vol. 9–10 (2016–2017). ISSN 2161-6590 (online). DOI 10.5195/hcs.2017.221. Diunduh dari <http://hcs.pitt.edu>.
- Rachmawati, L., Cahyono, H., Nugraha, J., Watjuba, L. dan Hanifa, N. (2020), “Shift Share Analysis Indonesia Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 16 No. 3, hal. 165–178
- Rassy, Dunia and Smith, Richard D. The Economic Impact of H1N1 on Mexico’s Tourist and Pork Sectors. *Health Economics*. 22: 824–834 (2013) Published online 19 July 2012 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/hec.2862.
- Suparmoko M. (2002). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Percetakan Andi Offset.
- Udofia, E.E., Adejare, B.O., Olaore, G.O. and Udofia, E.E. (2021). Supply disruption in the wake of COVID-19 crisis and organisational performance: mediated by organisational productivity and customer satisfaction. *Journal of Humanities*

and Applied Social Sciences. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. Diunduh dari <https://doi.org/10.1108/JHASS-08-2020-0138>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). Coronavirus: The Economic Impact. Diunduh melalui laman <https://www.unido.org/stories/coronavirus-economic-impact>.

Worldometer. (2020). Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance. Diakses melalui laman https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?%22#countries

Biografi Tim Penulis

1. Dr. Lucky Rahmawati, S.E., M.Si.



Lahir di Jember, 30 Mei 1983. Pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas ditempuh di Jember. Tahun 2001 sampai 2005 menempuh Pendidikan S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Jember. Tahun 2005-2008 melanjutkan Pendidikan S-2 Ilmu Ekonomi di Universitas Padjadjaran. Pada 2012-2017 menempuh Pendidikan S-3 Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga. Sejak 2009 menjadi dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dan mengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, Ekonomi Publik, Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan, Ekonomi Sumberdaya Alam, Ekonomi Demografi, Statistika Ekonomi dan Ekonometrika. Sudah menulis beberapa jurnal bereputasi baik dalam negeri maupun internasional dan menghasilkan puluhan judul penelitian di bidang Ekonomi Sumber Daya. Sejak 2020 sampai sekarang menjadi Ketua Divisi Unit Bisnis Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Surabaya. Alamat email: luckyrachmawati@unesa.ac.id.

2. Hendry Cahyono, S.E., M.E.



Lahir di Pamekasan, 25 Juni 1985. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Pamekasan. Tahun 2003 sampai 2007, menempuh pendidikan S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Melanjutkan studi Magister Ilmu ekonomi di kampus yang sama sampai 2009. Pada saat ini sedang menyelesaikan studi program Doktorat Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sejak 2009 menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dengan mengampu mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Regional, Ekonomi Pembangunan, dan Ekonomi Politik. Sudah menulis beberapa jurnal bereputasi baik dalam negeri maupun internasional dan menghasilkan puluhan judul penelitian serta beberapa buku referensi di bidang ilmu ekonomi. Sejak 2016 menjadi Ketua Program Studi S-1 Ekonomi FE UNESA. Alamat email: hendrycahyono@unesa.ac.id.

3. Jaka Nugraha



Lahir di Tulungagung, 8 Februari 1988. menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Tulungagung. Tahun 2007 sampai 2011, menempuh pendidikan S-1 Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Melanjutkan studi Magister Ilmu Administrasi Bisnis dan Master of Business Administration di dua kampus berbeda, yaitu Universitas Brawijaya dan National Pingtung University of Science and Technology Taiwan pada 2011-2013. Aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomika dan

Bisnis (FEB) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sejak 2014 dan mengampu mata kuliah kewirausahaan, sistem informasi manajemen, serta metodologi penelitian dan statistik. Mengikuti berbagai macam seminar atau konferensi tingkat nasional dan internasional dengan publikasi yang telah dimuat dalam jurnal bereputasi nasional (Sinta) maupun internasional (Scopus). Selain itu penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menulis buku referensi di bidang kewirausahaan. Sejak 2020 menjadi Sekretaris Divisi Akreditasi Internasional, Satuan Penjaminan Mutu Unesa. Alamat email: jakanugraha@unesa.ac.id.

4. Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, S.Pd., M.S.E.



Lahir di Surabaya, 10 Mei 1990. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas di Mojokerto. Meraih gelar sarjana pendidikan pada 2012 di Universitas Negeri Surabaya dan melanjutkan Pendidikan Magister Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Tahun 2016 berhasil meraih gelar Magister Ilmu Ekonomi dengan masa studi 2 tahun. Sejak 2019 menjadi dosen di Universitas Negeri Surabaya di Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis hingga saat ini. Menjadi dosen pengampu mata kuliah ekonomi moneter, ekonomika internasional, dan mata kuliah konsentrasi ekonomi moneter lainnya. Hingga kini aktif menulis jurnal nasional. Menjadi dosen muda yang atraktif dan mau belajar banyak hal adalah motivasi yang selalu dipegang. Alamat email: ladifisabilillah@unesa.ac.id.

5. Nurul Hanifa, S.E., M.Si.



Lahir di Medan, 04 Februari 1991. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Medan. Tahun 2008 sampai 2012 menempuh pendidikan S-1 Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Melanjutkan studi Magister Ilmu Ekonomi di kampus yang sama pada 2015 sampai 2017. Saat ini aktif sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Negeri Surabaya dan juga aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah. Alamat email: nurulhanifa@unesa.ac.id.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat untuk dilalui baik oleh individu, dunia usaha, maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tidak ada satu negara pun yang memprediksi dan menyiapkan diri bahwa tahun 2020 akan menjadi awal masa pandemi yang begitu hebat akibat koronavirus (COVID-19). Ekonomi global mengalami guncangan, *outlook* ekonomi 2020 yang dibuat pada 2019 oleh lembaga ekonomi dunia seperti *World Bank* dan *International Monetary Funds* (IMF) meleset jauh. Sepertinya baru kali ini prediksi dari lembaga ekonomi internasional meleset jauh.

Dari hasil analisis yang disajikan dalam buku ini, tim penulis mengambil posisi untuk tidak ikut mengutuk kegelapan ekonomi dalam kondisi pandemi, akan tetapi tim penulis berusaha menyalakan pelita dalam lorong gelap kondisi ekonomi di masa pandemi. Kami sadar jika hanya mengkritisi kebijakan ekonomi tidak akan pernah ada halaman akhirnya. Setidaknya kami tetap memberikan energi optimis pada pembaca bahwa masa sulit bagi perekonomian ini bisa segera dilalui.

* * *

Di antara potret yang disuguhkan dalam buku ini adalah di satu sisi memang pandemi membuat kondisi perekonomian babak belur, tetapi di sisi lain kita diyakinkan oleh buku ini bahwa masih ada sektor-sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di masa pandemi.

Dr. H. Khoirul Anwar, M.E.I.

Sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Provinsi Jawa Timur 2021-2025
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEB Unesa

Buku yang padat data, informatif, dan kekinian khususnya mengupas tentang kondisi perekonomian di masa pandemi sehingga layak menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa ilmu ekonomi maupun khalayak umum.

Dr. Ulil Hartono, S.E., M.Si.

Ketua Dewan Pengurus Nasional APSMBI

Penerbit

MEJATAMU

Perum Sidokare Asri A5-17, Sidoarjo
www.mejatamu.net

